

**POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011-2015**



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

Julita Dwi Lestari

1113084000061

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H / 2017 M**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011-2015

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

Julita Dwi Lestari
1113084000061

Di bawah Bimbingan:

Pembimbing I



Arisman, M.Si

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H / 2017 M

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Rabu, 10 Mei 2017 telah dilakukan uji komprehensif atas mahasiswa:

1. Nama : Julita Dwi Lestari
2. NIM : 1113084000061
3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan
4. Judul Skripsi : **Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015**

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 10 Mei 2017

1. Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D
NIP. 19560505 200012 1 001



(.....)
Penguji I

2. Najwa Khairina, MA.



(.....)
Penguji II

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Selasa, 22 Agustus 2017 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : Julita Dwi Lestari
2. NIM : 1113084000061
3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan
4. Judul Skripsi : **Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015**

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 Agustus 2017

1. Arief Fitriyanto, M.Si
NIP. 19711118 200501 1 003


Ketua

2. Arisman, M.Si
NIP. 19730510 201411 1 003


Sekretaris

3. Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D
NIP. 19560505 200012 1 001


Penguji Ahli

4. Arisman, M.Si
NIP. 19730510 201411 1 003


Pembimbing

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Julita Dwi Lestari

NIM : 1113084000061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tangerang, 14 Juli 2017



Julita Dwi Lestari
NIM: 1113084000061

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama lengkap : Julita Dwi Lestari
2. Tempat, Tanggal Lahir: Tangerang, 19 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Lestari Molek Raya Blok DV/e No.17
Medang, Pagedangan, Tangerang, Banten
6. No.Telepon : 081288990997
7. Email : julitadwilestari@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK : TK Cempaka Tangerang
2. SD : SDN 03 Jakarta
3. SMP : SMPN 88 Jakarta
4. SMA : SMAN 35 Jakarta
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

C. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Tri Joko Santoso
2. Ibu : Siti Ningrum
8. Alamat : Jalan Lestari Molek Raya Blok DV/e No.17
Medang, Pagedangan, Tangerang, Banten
3. Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara

ABSTRACT

This research aims to determine potential sectors, basic sectors, and competitive sectors in the economy of West Bandung Regency.

Primary data obtained through interviews and secondary data sourced from BPS West Java Province, West Bandung Regency BPS, and West Bandung Regency Bappeda period of 2011-2015. While the analytical tool used Klassen Tipology, Location Quotient (LQ), and Shift-Share.

Based on the analysis, three sectors (Agriculture, Forestry and Fisheries, Electricity and Gas Supply, and Provision of Accommodation and Drinking) are potential sectors in West Bandung Regency with the criteria of advanced and fast growing sector, basic sector and competitive sector. The direction of economic development policy of West Bandung regency is focused on optimizing the potency of region owned to increase economic growth.

Keywords: Potential Sector, Economic Base, Competitive Advantage, Regional Development Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor potensial, sektor basis, dan sektor kompetitif dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Data primer didapatkan melalui wawancara dan data sekunder bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten Bandung Barat, dan Bappeda Kabupaten Bandung Barat kurun waktu tahun 2011-2015. Sedangkan alat analisis digunakan Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), dan *Shift-Share*.

Dari hasil analisis ditemukan tiga sektor (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang merupakan Sektor potensial di Kabupaten Bandung Barat dengan memiliki kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan sektor kompetitif. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat difokuskan pada pengoptimalan potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Sektor Potensial, Basis Ekonomi, Keunggulan Kompetitif, Kebijakan Pembangunan Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Arief Fitriyanto, M.Si selaku Kepala Jurusan Ekonomi Pembangunan;
2. Ibu Najwa Khairina, MA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan;
3. Bapak Arisman, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam hal – hal akademik sehingga dapat dilancarkan segala urusan penulis saat ini;
5. Bapak Kepala Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat beserta karyawan yang telah memberikan izin penulis melaksanakan penelitian, meluangkan waktu untuk bersedia di wawancara

dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penulisan skripsi.

6. Bapak Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat beserta karyawan yang telah terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penulisan skripsi.
7. Papa dan Mama, orang tua tercinta atas segala pengorbanan, doa, dukungan, ketulusan, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis;
8. Dini, Indah, Apriyani, dan Anum atas segala bantuan, semangat, doa, motivasi dan dukungannya;
9. Ajie Anugerah yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan demi lancarnya penyusunan skripsi ini;
10. Keluarga Besar Ekonomi Pembangunan angkatan 2013, atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis;
11. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Tangerang, Juli 2017

DAFTAR ISI

COVER	I
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	III
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VI
ABSTRACT	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVIII

BAB I. PENDAHULUAN

A.	Lata
r Belakang Penelitian	1
B.....	Peru
musan Masalah.....	11
C.....	Tuj
uan dan Manfaat Penelitian.....	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Teo
ri yang berkenaan dengan variabel yang diambil.....	14
1.....	Teo
ri Lokasi	14

2.....	Teo
ri Keunggulan Kompetitif	15
3.....	Mo
del Basis Ekonomi (Economic Base Theory)	17
4.....	Mo
del Neo-Klasik	18
5.....	Pro
duk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
6.....	Tip
ologi Klassen.....	23
7.....	Ana
lisis <i>Shift-Share</i>	25
8.....	Keb
ijakan Pembangunan Daerah.....	27
B.....	Pen
elitian Sebelumnya.....	29
C.....	Ker
angka Berpikir.....	36

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A.	Rua
ng Lingkup Penelitian	38
B.....	Met
ode Penentuan Sampel	38

C.....	Met
ode Pengumpulan Data	39
1.....	Dat
a Primer	39
a.....	Wa
wawancara (<i>Interview</i>).....	39
2.....	Dat
a Sekunder.....	40
a.....	Penelitian
Lapangan (<i>Field Research</i>).....	40
b.....	Studi
Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	40
D.	Met
ode Analisis Data	42
1.....	Ana
lisis Tipologi Klassen	42
2.....	Loc
ation Quotient Analysis (LQ).....	43
3.....	Ana
lisisShift – Share	45
4.....	Ana
lisis Deskriptif	48

E.....	Ope
rasional Variabel Penelitian	48
1.....	Pote
nsi Ekonomi	48
2.....	Pro
duk Domestik Regional Bruto (PDRB)	49
3.....	Laju
Pertumbuhan Ekonomi.....	49
4.....	Kon
tribusi PDRB	50
5.....	Sekt
or-Sektor Ekonomi.....	50

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.	Ga
mbaran Umum Objek Penelitian.....	52
1. Pembentukan Kabupaten Bandung Barat	52
2. Letak Geografis.....	53
3. Wilayah Administratif.....	53
4. Demografi.....	55
5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung Barat	58

B.....	Ana
lisis dan Pembahasan	63
1. Analisis Tipologi Klassen.....	63
2.....	Ana
lisis Location Quotient (LQ).....	68
a.....	Sekt
or Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70
b.....	Sekt
or Pengadaan Listrik dan Gas	72
c.....	Sekt
or Transportasi dan Pergudangan.....	73
d.....	Sekt
or Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	74
e.....	Sekt
or Real Estat	76
f.....	Sekt
or Jasa Perusahaan	77
g.....	Sekt
or Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	78
h.....	Sekt
or Jasa Pendidikan.....	80

3.....	Ana
lisis <i>Shift-Share</i>	82
4.....	Keb
ijakan Pembangunan Daerah.....	87

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesi
mpulan.....	91
B.....	Sara
n.....	92

DAFTAR PUSTAKA	94
----------------------	----

LAMPIRAN.....	96
---------------	----

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2015 (Juta Rupiah)	5
1.2	Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Tahun 2012	7
2.1	Penelitian Sebelumnya	32
3.1	Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral	42
4.1	Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa	54
4.2	Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015	57
4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 (persen)	60
4.4	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (persen)	62
4.5	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (LP) dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat	64

Tahun 2011-2015 (persen)

4.6	Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	65
4.7	Location Quotient (LQ) Rata-Rata Kabupaten Bandung Barat	69
4.8	Jumlah Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013	74
4.9	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 dan 2012	79
4.10	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru Menurut Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015/2016	81
4.11	Hasil Perhitungan Nilai Shift-Share Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	84
4.12	Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Menurut RPJMD dan RIP	90

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1.1	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015 (persen)	6
1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011–2015 (persen)	10
2.1	Bagan Kerangka Pemikiran	37
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat	55
4.2	Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2015	56
4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 (persen)	59
4.4	Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Tahun 2012	71
4.5	Jumlah Hotel di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013	75

DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
I	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	96
II	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	97
III	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (persen)	98
IV	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (persen)	99
V	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)2011-2015	100
VI	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2015	101

VII	Perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Bandung Barat, 2011-2015	102
VIII	Perhitungan Nasional Share (NS) Kabupaten Bandung Barat	108
IX	Perhitungan Proporsional Shift (Pr) Kabupaten Bandung Barat	113
X	Perhitungan Differential Shift (Dr) Kabupaten Bandung Barat	120
XI	Hasil Analisis Tipologi Klassen, LQ, dan <i>Shift-Share</i> per Sektor Ekonomi	126
XII	Surat Keterangan Izin Penelitian	127
XIII	Hasil Wawancara Bappeda Kabupaten Bandung Barat	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan (Arsyad, 2002:108). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya fisik secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut (Aditya Nugraha Putra, 2013:2).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu tantangan saat ini yang paling nyata pada era otonomi daerah adalah bagaimana setiap daerah mampu mengembangkan potensi ekonomi wilayah ini secara optimal.

Menurut Anwar dan Rustiad (2000), setiap daerah mempunyai sektor-sektor unggulan yang memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Dampak yang diberikan oleh sektor-sektor tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitannya langsung maupun tidak langsung maka pengembangan terhadap sektor-sektor unggulan ini akan menyebabkan pengembangan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian pengembangan wilayah perlu memperhatikan sektor-sektor unggulan yang ada dalam rangka penentuan prioritas pembangunan sehingga menjadi lebih terfokus. Adanya kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pada prioritas dapat menghasilkan suatu kebijakan yang lebih terarah sehingga mengurangi resiko kemubaziran pemanfaatan sumberdaya.

Salah satu daerah otonom baru yang belum lama ini memekarkan diri adalah Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah sebesar 1.305,77

Km² yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Penetapan Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007 (RPJMD Kabupaten Bandung Barat, 2013:II-1).

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu, dan Saguling (RPJMD Kabupaten Bandung Barat, 2013:II-2). Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, sebagai sumber pendapatan daerah guna membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian dan sebagai ukuran kemajuan suatu daerah (MK Sanjaya, 2014:2). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang

selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah.

PDRB Kabupaten Bandung Barat disumbang oleh 17 (tujuh belas) sektor yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya.

Berdasarkan Tabel. 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.25,477,219.0 (juta rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar 1.25 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB tahun 2011 atas dasar harga konstan 2010 mengalami penurunan mencapai Rp20,419,114.5 (juta rupiah).

Secara umum, di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi sektor unggulan untuk penggerak pembangunan ekonomi daerah adalah sektor Industri Pengolahan. Hal ini terbukti dari peranan sektor industri yang tetap mendominasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel. 1.1 pada tahun 2015, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto yaitu

Rp 10,148,107.4 (juta rupiah). Begitupun hal yang sama di tahun 2011, sektor Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar Rp 3,676,101.9 (juta rupiah) di tahun 2015.

Tabel. 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 dan 2015 (Juta Rupiah)

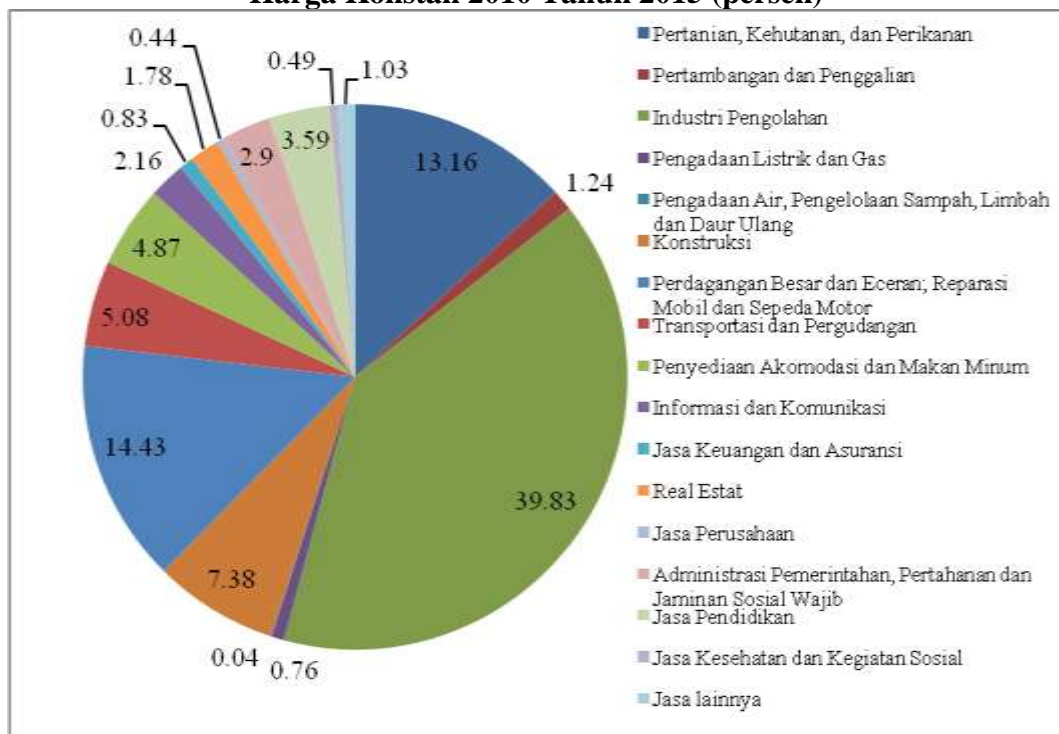
Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan	
	2011	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,132,147.2	3,352,645.5
Pertambangan dan Penggalian	302,890.1	315,157.5
Industri Pengolahan	8,088,088.1	10,148,107.4
Pengadaan Listrik dan Gas	159,061.8	193,855.7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,848.9	9,539.3
Konstruksi	1,373,595.6	1,881,117.4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,787,875.0	3,676,101.9
Transportasi dan Pergudangan	1,049,714	1,293,586.5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	926,783.3	1,240,160.2
Informasi dan Komunikasi	389,141.2	549,155.7
Jasa Keuangan dan Asuransi	150,493.0	210,829.0
Real Estat	366,326.4	453,883.0
Jasa Perusahaan	85,678.7	113,082.4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	708,069.9	739,685.9
Jasa Pendidikan	615,623.3	914,268.8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,501.7	124,120.6
Jasa lainnya	189,276.3	261,922.2
Produk Domestik Regional Bruto	20,419,114.5	25,477,219.0

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Di samping industri pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan juga mempunyai peranan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Dengan kontribusi sebesar Rp 3,352,645.5 (juta rupiah) di tahun 2015 sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan menjadi potensi ekonomi untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya memiliki karakteristik pedesaan, biasanya dominan pada sektor pertaniannya. Sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memberikan kontribusi terendah di setiap tahunnya. Sektor tersebut merupakan sumber energi yang memegang peranan vital bagi setiap kegiatan kehidupan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi.

Gambar. 1.1
Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Struktur perekonomian tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah. Struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar. 1.1, dimana kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB diberikan oleh sektor Industri Pengolahan sebesar (39.83 persen). Kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar (14.43 persen); sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kehutanan (13.16 persen); sektor Konstruksi (7.38persen); sektor Transportasi dan Pergudangan (5.08 persen) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4.87 persen). Sementara peranan sektor lainnya di bawah 4 persen.

Hal ini berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat yang mana dapat dilihat pada Tabel. 1.2.

Tabel. 1.2
Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas
Tahun 2012

Lapangan Pekerjaan	2012
Pertanian	27.18
Perdagangan	18.26
Industri	16.66
Jasa	13.44
Lainnya	24.47

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat IPM Tahun 2012

Berdasarkan tabel ini, penduduk Kabupaten Bandung Barat yang bekerja tersebar diberbagai sektor. Dari 577.628 penduduk yang bekerja, 27.18 persennya bekerja di sektor pertanian, 18.26 persen bekerja di sektor perdagangan, 16.66 persen di sektor perdagangan, 13.44 persen di sektor jasa, dan sisanya tersebar di sektor lainnya. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja

terbesar dibanding dengan sektor lainnya. Penduduk Kabupaten Bandung Barat bisa dikatakan masih didominasi oleh sektor pertanian.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah pertanian yang subur dengan pemandangan alam yang indah. Kondisi geografis di wilayah tersebut memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah kawasan yang relatif datar (di sekitar wilayah Kota Padalarang) berkembang kawasan industri dan wilayah perkotaan Sementara itu, kawasan dataran tinggi di Kabupaten Bandung Barat berbasiskan kegiatan pertanian dan peternakan, beberapa wilayah perbukitan seperti di Kecamatan Lembang menjadi kawasan andalan pariwisata di kabupaten ini. (RPJMD Kabupaten Bandung Barat, 2013:II-7).

Berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2013, diketahui bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan yang subur serta banyak aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Dengan jumlah curah hujan yang relatif cukup dan kondisi tanah yang subur menyebabkan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang sangat prospektif dalam pengembangan sektor pertanian.

Selama tiga tahun terakhir penggunaan lahan untuk pemukiman dan industri secara kasat mata menunjukkan peningkatan yang relatif signifikan. Pembangunan perumahan/pemukiman terus dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan penduduk terhadap perumahan. Namun disayangkan bahwa

pembangunan tersebut sebagian dilaksanakan pada lahan sawah yang potensi, sehingga terjadi alih fungsi lahan. Dalam hal ini pada masa mendatang penataan ruang dan lahan hendaknya mempertimbangkan agar lahan potensi pertanian atau lahan serapan air tetap dipertahankan.

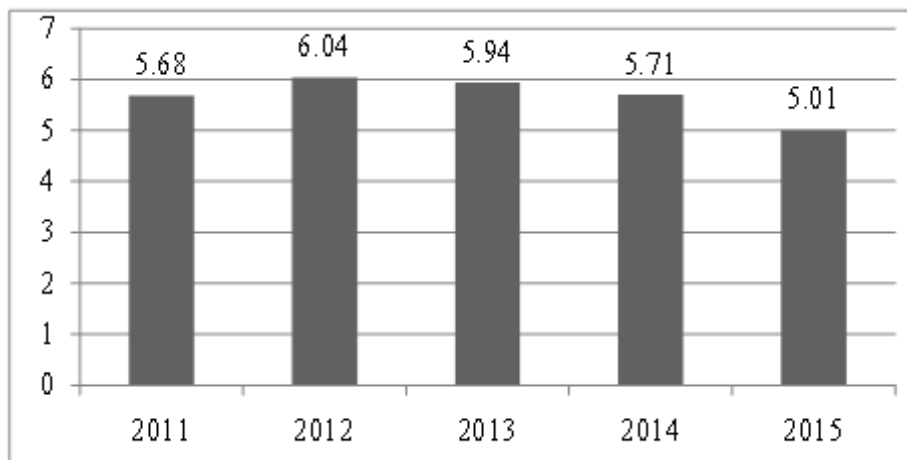
Kurniasih dan Rusfiana (2016) meneliti mengenai pengembangan kecamatan di Bandung Barat. Dalam penelitian ini didapatkan temuan bahwa kondisi wilayah Kecamatan Lembang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat. Setiap akhir pekan atau hari libur, wilayah ini selalu dikunjungi oleh para wisatawan. Selain udaranya yang sejuk, banyak objek wisata yang menarik dikunjungi. Semakin hari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lembang semakin bertambah. Hal ini dikarenakan semakin banyak dibukanya objek-objek wisata di sekitar Lembang. Dampak yang dirasakan adalah kemacetan yang sangat padat menjelang akhir pekan di Kabupaten Bandung Barat.

Kemacetan di sekitar Lembang diakibatkan kurangnya area perparkiran di sekitar objek wisata. Sehingga dipandang perlu adanya sarana perparkiran modern untuk menyerap kendaraan di parkiran. Hal ini dimaksudkan agar sarana parkir yang sudah ada dapat lebih nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke tujuan wisata Lembang. Sektor pariwisata Lembang yang menjadi *hunting area* wisatawan, harus diikuti dengan pembinaan para Pedagang Kaki Lima untuk wisata kulinernya. Selain itu, di kawasan Lembang perlu ada pelestarian penjagaan situs daerah, pengembangan seni

keterampilan dan kerajinan, pendayagunaan lahan produktif, potensi komunitas dan organisasi untuk menunjang pengembangan wilayah.

Indikator ekonomi daerah berikutnya yang lazim digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu (Sjafrizal, 2014:156).

Gambar. 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011–2015 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Pada Gambar. 1.2 perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bandung Barat tahun 2015 mencapai 5.01 persen sedangkan tahun 2014 sebesar 5.71 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan

pemukiman. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka berpengaruh pula terhadap peningkatan konsumsi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap perumahan. Dalam hal ini pada masa mendatang, pengambilan kebijakan diarahkan kepada penataan ruang dan lahan hendaknya mempertimbangkan agar lahan potensi pertanian atau lahan serapan air tetap dipertahankan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Di dalam perekonomian investasi sangatlah penting untuk menunjang kegiatan di berbagai sektor ekonomi. Investasi merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Maka diperlukan suatu pengembangan sektor-sektor potensial guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan seluruh kondisi diatas, terdapat banyak potensi ekonomi di Kabupaten Bandung Barat tetapi belum dikembangkan secara maksimal. Maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sektor potensial daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peneliti ingin membuat penelitian dengan judul **“Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih mudah dicapai bila diarahkan pada sektor-sektor yang unggul dan berpotensi sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mengingat sejak otonomi daerah dicanangkan setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber ekonomi yang terdapat di wilayahnya sebagai sumber pendapatan daerah guna membiayai kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak potensi ekonomi terhadap sektor-sektornya tetapi masih belum dikembangkan secara optimal. Dengan demikian identifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan menjadi salah satu bagian yang penting yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian wilayah di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Sektor ekonomi mana saja yang menjadi sektor basis dan sektor non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat ?
3. Sektor ekonomi mana saja yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Bandung Barat ?
4. Bagaimana kebijakan yang berkelanjutan untuk pengembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengklasifikasi sektor basis dan sektor non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengklasifikasi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Bandung Barat.
4. Mengidentifikasi kebijakan yang berkelanjutan untuk pengembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah:

1. Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang potensi pertumbuhan di Kabupaten Bandung Barat sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya.
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka program

pembangunan selanjutnya dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada.

3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang berkenaan dengan Variabel yang diambil

1. Teori Lokasi

Alfred Weber, seorang ahli ekonomi Jerman menulis buku berjudul *Über den Standort der Industrien* pada tahun 1909. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1929 oleh C.J. Friedrich dengan judul *Alfred Weber's Theory of Location of Industries*. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Uraian tentang teori Weber ini mengikuti uraian yang terdapat dalam buku John Glasson, 1974 (Muzayanah, 2015:118).

Dalam perumusan modelnya, Weber bertitik tolak pada asumsi berikut:

1. Unit telaahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna.
2. Beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu bata tersedia di manamana (ubiquitous) dalam jumlah yang memadai.
3. Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadis dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas.
4. Tenaga kerja tidak ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas.

Berdasarkan asumsi itu, ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak aglomerasi atau deaglomerasi. Biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental menentukan pola lokasi dalam kerangka geografis. Dampak aglomerasi atau deaglomerasi merupakan kekuatan lokal yang berpengaruh menciptakan konsentrasi atau pemencaran berbagai kegiatan dalam ruang (Muzayana, 2015:119).

2. Teori Keunggulan Kompetitif

Teori keunggulan kompetitif dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nation* (1990). Menurut Porter tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi (sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah) yang dimiliki

suatu negara, yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan kompetitif jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya.(Donald A.Ball, dikutip dalam Donald A.Ball, 2000).

Abdullah dkk (2002, h.15) menjelaskan bahwa “daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.”

Porter menyatakan terdapat empat atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional, yaitu sebagai berikut.

- a. Kondisi faktor produksi. Posisi negara dalam faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur, perlu untuk bersaing dalam suatu industri tertentu.
- b. Keadaan permintaan dan tuntutan mutu di dalam negeri untuk barang dan jasa industri.
- c. Industri terkait dan industri pendukung. Keberadaan atau tidak adanya industri pemasok dan industri terkait lainnya di negara tersebut yang secara internasional bersifat kompetitif.

d. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan. Kondisi dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur dan dikelola sebagaimana juga sifat dari persaingan domestik.

Selain keempat faktor tersebut, keunggulan kompetitif nasional juga masih dipengaruhi oleh faktor kebetulan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu (*chance events*), seperti penemuan produk baru, melonjaknya harga, perubahan nilai tukar, konflik keamanan antar negara dan lain-lain, dan tindakan-tindakan atau kebijakan pemerintah (*government*)(Donald A. Ball, dikutip dalam Donald A. Ball, 2000).

3. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2002:116). Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008:87).

Dalam hal ini, perekonomian suatu daerah (Y) dibagi atas 2 kelompok sektor utama yaitu sektor basis (B) dan sektor non basis (S). Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau dapat dikatakan *service industries* (Sjafrizal, 2005:89).

Dasar pemikiran teori ini yang intinya adalah karena sektor basis menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun diluar daerah yang bersangkutan. Maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Peningkatan pendapatan itu tidak hanya akan menaikkan permintaan pada sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan terhadap sektor non basis (Arsyad, 2002).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah digunakan analisis Location Quotient (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia, 2006:24). LQ menggunakan rasio total nilai PDRB disuatu daerah (kabupaten/kota) dibandingkan dengan rasio PDRB pada sektor yang sama di wilayah referensi (provinsi/nasional) (Aditya Nugraha Putra, 2013:13).

4. Model Neo-Klasik

Model Neo Klasik dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan

produksi. Selanjutnya Model Neo-Klasik yaitu pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu kemajuan teknologi (a), penambahan modal atau investasi (k), dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja (l) (Sjafrizal, 2008:95).

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011:2).

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi) (Hilal Almulaibari, 2011:29).

a. Metode Langsung

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS, 2008). Seperti dikatakan di atas, penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut :

1). PDRB Menurut Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added). Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total produksi bruto sector atau sub sector tersebut.

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa, tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2005).

2). PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua komponen tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3). PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*).

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok dan ekspor neto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik.

b. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini, digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan; jumlah produksi

fisik; tenaga kerja; penduduk dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :

1). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2). PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar PDRB secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973,

1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan yaitu: Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil; Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun; Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI); dan Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2015).

6. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu sektor. Dalam hal ini analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pangsa sektor subsektor usaha atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi atau secara nasional. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi

pertumbuhan dan pangsa sektor subsektor usaha atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah (Scuba Diver, 2008:51).

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal 2008:180):

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan (s) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (sk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski > sk$.
2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (si) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (s) tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (sk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski > sk$.
3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (si) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (s) tetapi kontribusi

sektor tersebut terhadap PDRB (ski) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (sk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski < sk$.

4. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (si) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (s) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (sk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski < sk$.

7. Analisis *Shift-Share*

Analisis *Shift-Share* ini pertama kali diperkenalkan oleh Perloff, et al. pada tahun 1960. Analisis *Shift-Share* ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian di suatu wilayah. Selain itu dapat juga digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama dua periode. Keunggulan utama dari analisis *Shift Share* yaitu analisis ini mengenai perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah (Sofiyanto, 2015:47).

Metode *Shift-Share* adalah salah satu teknik analisis dalam ilmu Ekonomi Regional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama

yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah bersangkutan sendiri. Faktor luar daerah dapat berasal dari perkembangan kegiatan ekonomi nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi karena terdapatnya hubungan ekonomi yang cukup erat dengan perekonomian nasional dan bahkan juga internasional. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam daerah biasanya timbul dari struktur perekonomian daerah serta potensi khusus yang dimiliki daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014:189).

Menurut John P.Blair, (1991) peningkatan nilai tambah suatu daerah dapat diuraikan (decompose) atas tiga bagian yaitu (Sjafrizal, 2014:189):

a. **Regional Share** adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh dorongan faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah, akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah atau karena dorongan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga;

b. **Proportionality Shift (Mixed Shift)** adalah komponen pertumbuhan ekonomi dari dalam daerah sendiri yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang relatif baik, yaitu berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional dapat pertumbuhannya cepat seperti sektor industri;

c. **Differential Shift (Competitive Shift)** adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah bersangkutan.

8. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah merupakan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan (Sjafrizal, 2014:154).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga mempengaruhi orientasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam era sentralisasi, pembangunan daerah sifatnya hanya sebagai pendukung pelaksanaan kebijaksanaan dan perencanaan nasional. Akibatnya, peranan yang dimainkan oleh kebijakan pembangunan daerah akan mengalami perubahan dan peranannya menjadi semakin penting. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah: bagaimana sebaiknya orientasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam era otonomi sehingga menjadi lebih terarah dan efisien. Perubahan orientasi perencanaan daerah tersebut

meliputi arah, sistem, kegiatan, maupun peranan kelembagaan perencanaan daerah (Sjafrizal, 2008:254).

a. Reorientasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Karena dalam era otonomi, campur tangan pusat akan semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing, maka sistem perencanaan pembangunan daerah yang semula lebih bersifat sektoral akan berubah menjadi lebih bersifat regional. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun lebih banyak memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya akan memberikan arah dan sasaran umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisien. Disamping itu, perencanaan makro hanya ditekankan pada masalah-masalah utama yang bersifat nasional dan perlu segera dipecahkan.

Perubahan sistem perencanaan nasional yang demikian dewasa ini telah mulai nampak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku dewasa ini telah memuat pemisahan yang tegas antara arah perencanaan pada tingkat nasional dan arah pada tingkat daerah. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan pada tingkat daerah, upaya untuk mendorong proses pembangunan lebih banyak diarahkan pada aspek-aspek yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pembangunan

yang dihadapi oleh daerah sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Penerapan Konsep Wilayah Pembangunan

Salah satu karakteristik penting dari konsep perencanaan wilayah adalah mempertimbangkan sebanyak mungkin variasi kondisi sosial ekonomi daerah kedalam perencanaan. Hal ini sangat penting artinya karena variasi kondisi sosial ekonomi antar daerah adalah cukup besar, sebagaimana halnya juga di Indonesia. Untuk dapat merumuskan strategi, kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi setempat, maka penerapan konsep Wilayah Pembangunan (*Development Region*) merupakan alat perencanaan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya untuk setiap wilayah pembangunan ditetapkan pula satu atau lebih Pusat Pengembangan (*Growth Poles*) yang akan berfungsi sebagai “penggerak” pembangunan wilayah yang bersangkutan. Melalui penetapan wilayah pembangunan dan pusat pengembangan tersebut akan dapat pula ditetapkan strategi, kebijaksanaan dan perencanaan yang lebih terarah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah setempat.

c. Proses Penetapan Proyek Pembangunan Daerah

Proses penetapan proyek-proyek pembangunan yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dilakukan penilaian dan penyeleksiannya melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah

yaitu desa. Pada RAKORBANG ini dibahas usulan proyek baik dari dinas dan instansi maupun dari masing-masing daerah. BAPPEDA melakukan penelitian dan selektif terhadap usulan proyek tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan arah dan prioritas pembangunan sebagaimana tertera dalam Rencana Tahunan (*Annual Planning*) yang telah disusun semula.

B. Penelitian Sebelumnya

Pada sub bab ini, dibahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penulisan maupun pengembangan penelitian selanjutnya. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, dapat dikembangkan lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan lainnya dengan mengembangkannya pada obyek penelitian yang lainnya.

Penelitian mengenai sektor basis telah dilakukan oleh beberapa peneliti, analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis LQ, *Shift-Share*, dan Tipologi Klassen. Selain menggunakan analisis tersebut adapula yang menggunakan analisis Overlay, Gravitasi, BSR, dan REM.

Penelitian Nevi Pahlevi (2011) dengan judul Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak (STUDI KASUS: Kawasan Agropolitan Kecamatan Wanasalam). hasil penelitian dengan menggunakan Klassen Tipology menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor pertanian dan sektor bangunan dan konstruksi merupakan sektor basis di Kecamatan Wanasalam. Hasil analisis Shift Share

menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Hasil analisis per sektor berdasarkan ketiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor yang menempatkan sektor unggulan di Kecamatan Wanasalam dengan kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan kompetitif adalah sektor pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha Putra (2013), dengan judul Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis LQ bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri pengolahan, serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis yang dominan di Provinsi DIY karena 3 kabupatennya mempunyai basis/unggulan di sektor ini; sedangkan sektor lainnya bervariasi khusus sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi hanya dimiliki Kota Yogyakarta sekaligus sebagai kota yang paling banyak memiliki sektor basis sama seperti Kabupaten Sleman (5 Sektor basis). Kota Yogyakarta masuk dalam Tipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kemudian Kabupaten Sleman yang masuk dalam Tipologi daerah berkembang cepat. Tiga kabupaten lainnya masuk dalam tipologi daerah relatif tertinggal. Dari hasil analisis LQ, Shift-Share, Tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul mempunyai prioritas pertama untuk pengembangan wilayah atas semua sektor basis yang dimilikinya.

Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel.2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Alat Analisis	Judul dan Hasil Penelitian
1.	Nevi Pahlevi (2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Location Quotient (LQ) - Shift Share - Klassen Tipology 	<p>Judul: Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak (STUDI KASUS: Kawasan Agropolitan Kecamatan Wanasalam)</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil analisis Klassen Tipology menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor pertanian dan sektor bangunan dan konstruksi merupakan sektor basis di Kecamatan Wanasalam. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Hasil analisis per sektor berdasarkan ketiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor yang menipakan sektor unggulan di Kecamatan Wanasalam dengan kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan kompetitif adalah sektor pertanian.</p>
2.	Aditya Nugraha Putra (2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Location Quotient (LQ) - Shift Share - Tipologi Klassen - Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 	<p>Judul: Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Hasil Penelitian: Sektor Pertanian, Sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri pengolahan, serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis yang dominan di Provinsi DIY karena 3 Kabupatennya mempunyai basis/unggulan di sektor ini; sedangkan sektor lainnya bervariasi khusus sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi</p>

			<p>hanya dimiliki Kota Yogyakarta sekaligus sebagai Kota yang paling banyak memiliki sektor basis sama seperti Kabupaten Sleman (5 Sektor basis). Kota Yogyakarta masuk dalam Tipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kemudian Kabupaten Sleman yang masuk dalam Tipologi daerah berkembang cepat. Tiga kabupaten lainnya masuk dalam tipologi daerah relative tertinggal. Dari hasil analisis LQ Shift-Share Tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral Kota Yogyakarta dan Kabupaten gunung Kidul mempunyai prioritas pertama untuk pengembangan wilayah atas semua sektor basis yang dimilikinya.</p>
3.	Hoirun Nisa (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Location Quotient (LQ) - Shift Share - Model Rasio Pertumbuhan (MRP) - Overlay - Metode Gravitasi 	<p>Judul: Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten</p> <p>Hasil Penelitian: hasil analisis LQ diketahui bahwa sektor basis di Kabupaten Lebak adalah terdiri dari 6 sektor diantaranya sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang bukan merupakan sektor basis sebanyak 3 sektor yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hasil analisis Shift Share dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) kemudian hasil keduanya digabungkan lalu di analisis dengan menggunakan analisis Overlay diketahui bahwa sembilan sektor yang ada di Kabupaten Lebak seluruhnya memiliki keunggulan kompetitif namun hanya terdapat beberapa sektor yang memiliki kemampuan spesialisasi. Sektor yang memiliki</p>

			keunggulan kompetitif dan spesialisasi diantaranya yaitu sektor pertambangan dan penggalian, bangunan atau konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Keempat sektor tersebut merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sedangkan sektor yang sebenarnya dapat dipicu untuk menjadi sektor yang dominan atau mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Hasil analisis metode gravitasi yaitu rata-rata interaksi yang paling kuat dengan Kabupaten Tangerang, kemudian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, serta interaksi terlemah yaitu dengan Kota Cilegon.
4.	Sofiyanto (2015)	- Location Quotient (LQ) - Shift Share	Judul: Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang (Pendekatan Location Quotient dan Shift Share Analysis) Hasil Penelitian: Dengan menggunakan Location Quotient (LQ) pada perekonomian Kabupaten Batang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Batang termasuk sektor unggulan. Berdasarkan analisis Shift Share pada perekonomian Kabupaten Batang, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang lambat. Dilihat dari daya saingnya sektor pertanian tidak memiliki daya saing yang baik dengan sektor yang sama di daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan profil pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Batang, sektor pertanian berada pada posisi kuadran III, yang artinya sektor pertanian merupakan sektor terbelakang dalam perekonomian

			Kabupaten Batang.
5.	Defi Nurdina (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Location Quotient (LQ) - Model Rasio Pertumbuhan (MRP) - Shift Share - Tipologi Klassen - Basic Serve Rasio (BSR) - Regional Employment Multiplier (REM) 	<p>Judul: Analisis Potensi Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial Kabupaten Ponorogo</p> <p>Hasil Penelitian: Analisis LQ menunjukkan terdapat Sembilan sektor basis dan delapan sektor non basis. Analisis Shift Share menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo berspesialisasi sama dengan sektor yang tumbuh di Jawa Timur. Hasil analisis Tipologi Klassen diperoleh empat kualifikasi wilayah termasuk kuadran I yang merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh, kuadran II termasuk daerah maju tapi tertekan, kuadran III termasuk daerah berkembang cepat dan kuadran IV termasuk daerah relatif tertinggal. Analisis BSR tahun 2010-2014 menunjukkan jumlah tenaga kerja pada sektor basis dibandingkan jumlah tenaga kerja pada sektor non basis. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang potensial dari perhitungan analisis LQ dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan pada sektor ekonomi non basis. Analisis REM selama tahun 2010-2014 menunjukkan nilai $REM > 1$ artinya setiap 100 lapangan kerja pada sektor ekonomi basis dapat menciptakan lapangan kerja pada sektor-sektor ekonomi non basis.</p>

C. Kerangka Berpikir

Suatu daerah memiliki potensi ekonomi masing-masing yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Tetapi tidak semua potensi ekonomi tersebut telah digali dan dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak potensi ekonomi terhadap sektor-sektornya tetapi masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu analisis terkait potensi ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah yang akhirnya dapat tercapai pengembangan wilayah yang diinginkan.

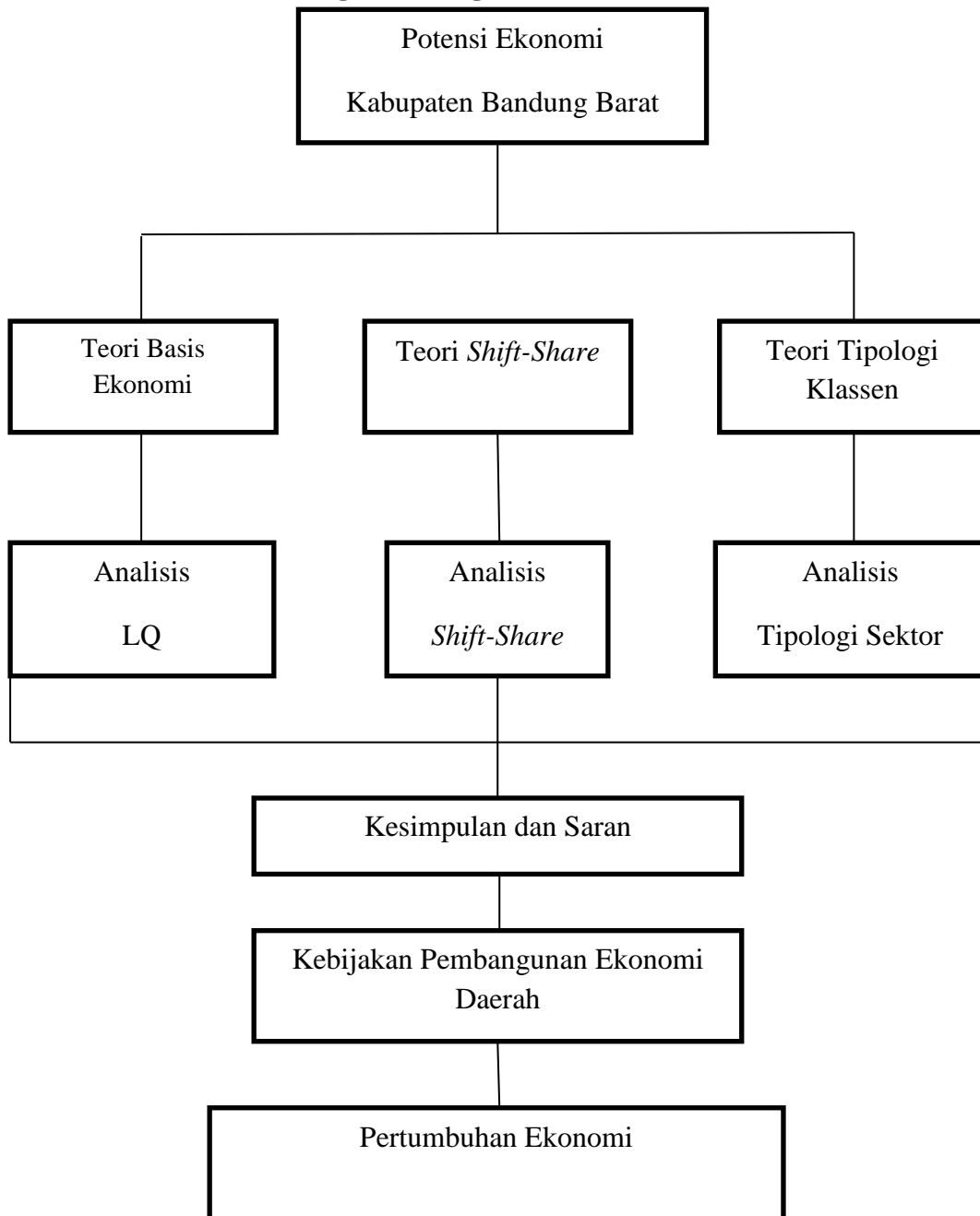
Potensi ekonomi dapat terlihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan melalui laju pertumbuhan dan distribusi. Dari PDRB akan dapat diketahui output yang dihasilkan tiap sektor dengan berpacu pada teori basis ekonomi yang digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis. Sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi berpacu pada teori shift-share. Dari laju pertumbuhan dan distribusi PDRB dengan berpacu pada teori Tipologi Klassen dapat diketahui tipologi masing-masing sektor untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sektor di Kabupaten Bandung Barat.

Kebijakan pembangunan suatu daerah haruslah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan dan inilah kunci keberhasilan program pengembangan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan itu harus mempertimbangkan sumber daya yang dapat dikembangkan tidak hanya

sektor basis akan tetapi juga mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain sekitarnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat.

Dari uraian diatas maka dapatlah disusun suatu skema sebagai berikut :

Gambar.2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2011: 404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah daerah di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini meliputi tahun 2011-2015 dengan menggunakan data *time series* yang bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi.

B. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro dikutip dalam Kuncoro, 2003). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Menurut Sugiyono (2005:56) sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel

dari penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan pertimbangan tertentu dari peneliti. Sugiyono (2005:78) mengungkapkan: “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bandung Barat.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2009: 39), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti wawancara (*interview*) atau angket dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melihat dokumen.

Beberapa metode yang penulis lakukan dalam memperoleh data yang diperlukan berupa:

1. Data primer

Cara mendapatkan data primer, yaitu dengan cara meninjau langsung lembaga yang menjadi objek penelitian dan teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah salah satu mendapatkan data dengan bertanya dalam bentuk berkomunikasi verbal atau wawancara guna

mendapatkan informasi dari responden. Dalam hal ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi; Kasubid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kasubid Perencanaan Pertanian, Perikanan, Energi, dan Sumber daya Mineral; serta Kasubid Sarana dan Prasarana Perumahan Pemukimanyang diperlukan informasinya dalam mendukung penulisan skripsi.

2. Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen atau laporan yang bersumber dari perusahaan dan pihak yang berkaitan khususnya bidang pemasaran. Teknik yang digunakan adalah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penulis melakukan penelitian ke tempat-tempat yang menyediakan data-data sekunder yang diperlukan sebagai bahan referensi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari buku, buku pedoman, buku program kerja atau literatur yang relevan dengan penyusunan skripsi. Penulis

melakukan penelitian dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, data-data dari internet dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Dengan metode *field research* dan *library research* didapatkan berbagai informasi data sekunder untuk digunakan dalam penelitian ini yang dipublikasikan oleh berbagai instansi atau lembaga terkait antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) (Provinsi Jawa Barat).
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) (Kabupaten Bandung Barat).
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (Kabupaten Bandung Barat).
- d. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.
- e. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka (KBBDA).
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.
- g. Buku Ekonomi Regional.
- h. Buku Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonom serta berbagai jurnal ilmiah lainnya.

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah referensi.

Tabel. 3.1
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektor

Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh denganpesat (<i>developed sector</i>) $si > s$ dan $ski > sk$	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>) $si < s$ dan $ski > sk$
Kuadran III Sektor potensial atau masih dapatberkembang (<i>developing sector</i>) $si > s$ dan $ski < sk$	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>) $si < s$ dan $ski < sk$

Sumber: Sjafrizal, 2008:180

Keterangan:

si = Laju pertumbuhan PDRB provinsi

s = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota yang diamati

ski = Kontribusi sektor terhadap PDRB provinsi

sk = Kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten/kota yang diamati

Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen sebagaimana tercantum pada Tabel. 3.1.

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

- a. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I).
Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski > sk$.
- b. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski > sk$.
- c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski < sk$.
- d. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski < sk$.

2. *Location Quotient Analysis (LQ)*

Untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Bandung Barat digunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dan PDRB Kabupaten Bandung Barat yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya

sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:183) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{Si}{S}}{\frac{Ni}{N}}$$

Keterangan :

Si = Nilai tambah sektor i di Kabupaten Bandung Barat

S = PDRB total di Kabupaten Bandung Barat

Ni = Nilai tambah sektor i di Provinsi Jawa Barat

N = PDRB total di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan formulasi dalam persamaan di atas maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro, 2004:183) yaitu:

- a. $LQ > 1$, mempunyai arti bahwa bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis. Produk yang dihasilkan tidak hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah saja, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Artinya, sektor tersebut merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

- b. $LQ = 1$, mempunyai arti bahwa bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis, karena produk yang dihasilkan hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah saja.
- c. $LQ < 1$, mempunyai arti bahwa bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis, karena produk yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah. Artinya, sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

3. Analisis *Shift – Share*

Analisis *Shift-Share* juga digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di daerah studi dengan daerah referensi. Perbedaanya analisis *Shift-Share* dengan Location Quotient adalah metode *Shift-Share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Selain itu analisis ini digunakan pula untuk melihat pertumbuhan PDRB dari sektor-sektor yang dimiliki baik dari pengaruh internal (faktor lokasional) maupun pengaruh eksternal (struktur industri) (Arsyad dikutip dalam Arsyad, 2002).

Rumus *Shift-Share* (Tarigan dikutip dalam Tarigan, 2005) adalah:

$$\Delta E_r = E_{rt} - E_{rt-n}$$

Artinya pertambahan sektor i adalah banyaknya jumlah output sektor i pada tahun akhir dikurangi output pada sektor i pada tahun awal. Persamaan diatas berlaku untuk total output pada sektor i di wilayah studi. Hal ini dapat juga dilihat persektor sebagai berikut:

$$\Delta E_{rit} = (NS_i + P_{ri} + D_{ri})$$

$$NS_{it} = E_{rit-n} (EN_t / EN_{t-n}) - E_{rit-n}$$

$$P_{rit} = \left(\frac{\Delta EN_{it}}{EN_{it-n}} - \frac{\Delta EN_t}{EN_{t-n}} \right) E_{rit-n}$$

$$D_{rit} = \left(\frac{\Delta E_{rit}}{E_{rit-n}} - \frac{\Delta EN_{it}}{EN_{it-n}} \right) \times E_{rit-n}$$

Keterangan :

Δ : Perubahan tahun akhir dikurangi dengan tahun awal

EN : Total PDRB Provinsi Jawa Barat

E_r : Total PDRB Kabupaten Bandung Barat

i : Sektor tertentu

t : Tahun

t-n : Tahun Awal

NS_i : *National Share* (Juta Rupiah)

P_{ri} : *Proportional Shift* (Juta Rupiah)

D_{ri} : *Differential Shift* (Juta Rupiah)

Pengukuran dari analisis *Shift-Share* (Tarigan dikutip dalam Tarigan, 2005) sebagai berikut:

a. NS_i bernilai positif menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Apabila NS_i bernilai negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Kabupaten Bandung Barat lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat.

b. Pr_i menghasilkan besarnya *shift netto* Kabupaten Bandung Barat yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Kabupaten Bandung Barat yang berubah. Komponen ini positif di daerah yang berspesialisasi pada sektor tertentu di Provinsi Jawa Barat tumbuh lebih cepat dan negatif bila daerah berspesialisasi pada sektor i dan pertumbuhannya lebih lambat.

c. Dr_i mengukur besarnya *shift netto* yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan Provinsi Jawa karena faktor lokasional seperti melimpahnya sumber daya. Dr_i bernilai positif pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan Dr_i bernilai negatif pada sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif.

4. Analisis Deskriptif

Menurut Moh. Nazir (2013), Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analisis Deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis Deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data potensi ekonomi wilayah yang diperoleh baik dari BPS, BAPPEDA, maupun dari hasil wawancara. Gambaran dan deskripsi tersebut digunakan untuk mengetahui kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat serta mengetahui potensi ekonomi daerah tersebut.

E. Operasional Variabel Penelitian

1. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko Dalam Nailatul, dkk, dikutip dalam Soeparmoko Dalam Nailatul, dkk, 2012). Dalam penelitian ini yang dianalisis

adalah potensi ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, yang nantinya dapat ditentukan kegiatan mana yang merupakan basis pada kabupaten tersebut dan komoditas apa yang menjadi unggulan di kabupaten tersebut.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan – kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (Kuncoro, dikutip dalam Kuncoro, 2013). Penelitian ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2015. Satuan dari PDRB yang digunakan yaitu dalam juta rupiah.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah besar kecilnya persentase peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut sektor produksi suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi bisa juga dapat diartikan sebagai kenaikan total PDRB tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, dikutip dalam Arsyad, 2002). Cara menghitung laju pertumbuhan total adalah total PDRB pada tahun akhir dikurangi total PDRB tahun awal dibagi total PDRB pada tahun awal dikalikan seratus persen.

4. Kontribusi PDRB

Struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Cara menghitung tingkat kontribusi PDRB per sektor ekonomi adalah PDRB sektor ekonomi dibagi dengan total PDRB dikalikan seratus persen.

5. Sektor-Sektor Ekonomi

Merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat dan BPS Provinsi Jawa Barat terdapat 17 sektor ekonomi yang diteliti maka yang dimaksud dengan sektor ekonomi yaitu:

- a. Pertanian Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Pengadaan Listrik dan Gas;
- e. Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang;
- f. Konstruksi;
- g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- h. Transportasi dan Pergudangan;
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- j. Informasi dan Komunikasi;
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- l. Real Estat;

m. Jasa Perusahaan;

n. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

o. Jasa Pendidikan;

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;

q. Jasa lainnya;

2. **Letak Geografis**

Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada $06^{\circ} 41' - 07^{\circ} 19'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 22' - 108^{\circ} 05'$ Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar $1.305,77 \text{ Km}^2$ atau $130.577,40 \text{ Ha}$ yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

3. **Wilayah Administratif**

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. 4.1. Luas wilayah dan jumlah desa di kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tidak merata. Beberapa kecamatan memiliki wilayah yang sangat luas (di atas 100 Km^2), misalnya

Gununghalu, Sindangkerta, Cipatat, Cikalong Wetan, Cipeundeuy dan Rongga. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km².

Tabel. 4.1
Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1.	Lembang	96,07	16
2.	Parongpong	45,12	7
3.	Cisarua	55,14	8
4.	Cikalongwetan	112,95	13
5.	Cipeundeuy	101,11	12
6.	Ngamprah	36,01	11
7.	Cipatat	125,66	12
8.	Padalarang	51,40	10
9.	Batujajar	31,87	7
10.	Cihampelas	46,93	10
11.	Cililin	77,78	11
12.	Cipongkor	79,99	14
13.	Rongga	113,17	8
14.	Sindangkerta	120,49	11
15.	Gununghalu	160,62	9
16.	Saguling	51,46	6
Kabupaten Bandung Barat		1.305,77	165

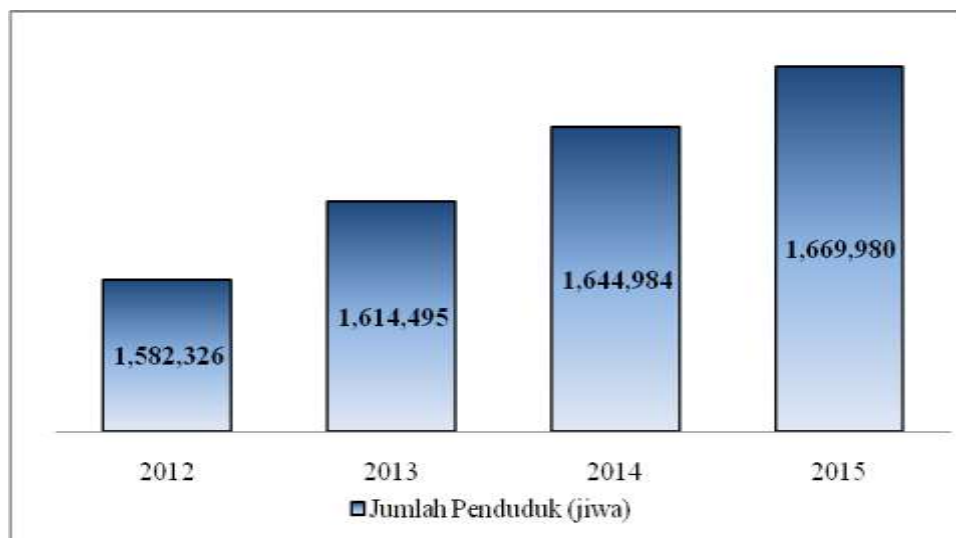
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029

Bahkan ada beberapa kecamatan yang memiliki jumlah desa di bawah jumlah yang disyaratkan Undang-Undang misalnya Kecamatan Saguling sebagai wilayah kecamatan baru hanya memiliki 6 desa. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Batujajar, posisi geografis menyebabkan desa-desa di wilayah Saguling terisolir sehingga pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah kecamatan sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan perluasan cakupan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menjadi beban pembangunan dan meningkatkan intensitas masalah di daerah.

Berdasarkan Gambar. 4.2, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 sebanyak 1.669.980 jiwa dengan komposisi (menurut jenis kelamin) relatif seimbang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 848.662 jiwa (50,82 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 821.318 jiwa (49,18 persen) dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 103,33 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.033 laki-laki. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,52%.

Gambar. 4.2
Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2012-2015



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, pertumbuhan migrasi masuk di Kabupaten

Bandung Barat cenderung mengalami kenaikan sehingga menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk terutama di beberapa kecamatan perkotaan yang menjadi pusat bisnis (industri, perdagangan dan jasa) dan pusat pendidikan. Pertumbuhan penduduk selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bandung Barat sebesar 5,54% atau naik sebesar 87.654 jiwa.

Tabel. 4.2
Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

Kecamatan	Laki – laki		Perempuan		Laki - laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
Rongga	28.008	50,93	26.980	49,07	54.988	100
Gununghalu	38.947	51,99	35.959	48,01	74.906	100
Sindangkerta	33.858	49,78	34.155	50,22	68.013	100
Cililin	45.522	51,28	43.258	48,72	88.780	100
Cihampelas	57.840	50,91	55.783	49,09	113.623	100
Cipongkor	45.732	51,24	43.524	48,76	89.256	100
Batujajar	47.663	49,78	48.080	50,22	95.743	100
Saguling	15.652	51,57	14.700	48,43	30.352	100
Cipatat	65.937	50,65	64.251	49,35	130.188	100
Padalarang	88.592	50,83	85.690	49,17	174.282	100
Ngamprah	87.978	51,01	84.500	48,99	172.478	100
Parongpong	55.723	50,77	54.035	49,23	109.758	100
Lembang	98.568	51,33	93.451	48,67	192.019	100
Cisarua	36.890	50,30	36.456	49,70	73.346	100
Cikalongwetan	60.844	50,27	60.200	49,73	121.044	100
Cipeundeuy	40.908	50,38	40.296	49,62	81.204	100
Kab. Bandung Barat	848.662	50,82	821.318	49,18	1.669.980	100

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Dilihat dari sebaran penduduknya di 16 kecamatan di Kabupaten

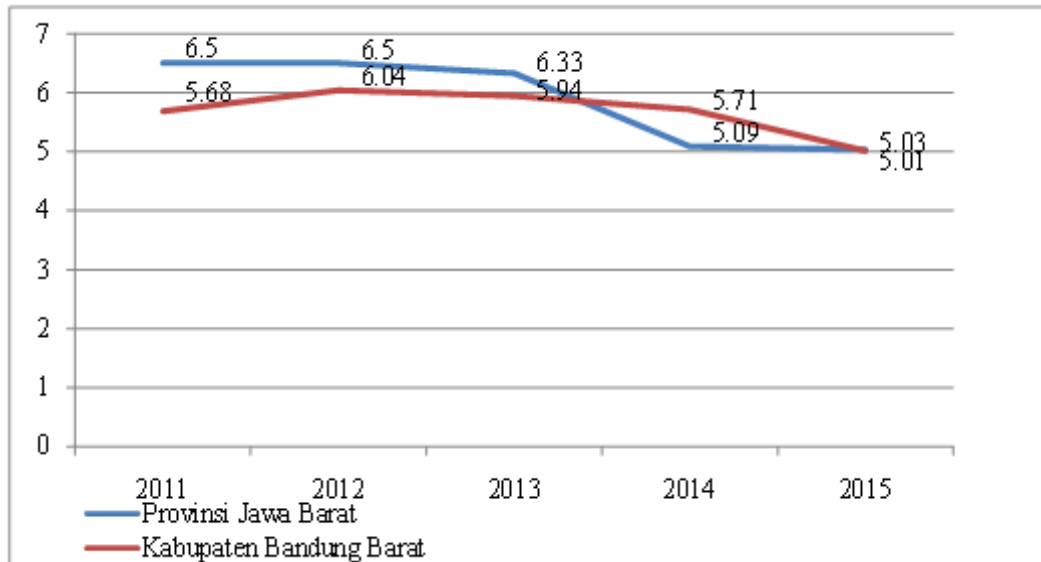
Bandung Barat pada Tabel. 4.2, tahun 2015 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Lembang dengan penduduk sebanyak 192.019 orang, diikuti oleh Kecamatan Padalarang yaitu sebanyak 174.282 orang. Sementara itu kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Saguling dengan penduduk sebanyak 30.352 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk Kab. Bandung Barat per Kecamatan tahun 2015 terlihat pada tabel berikut:

5. **Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung Barat**

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 secara riil ditunjukkan oleh Gambar. 4.3. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5.71 persen. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 5.09 persen.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 tidak secepat pertumbuhan perekonomian pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh pengaruh eksternal antara lain: kondisi ekonomi global yang melemah, penurunan kurs rupiah dan terutama masalah kekeringan yang panjang dan meluas menjadi penyebab melambatnya laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kabupaten Bandung Barat masih harus bekerja keras dalam melakukan akselerasi pembangunan wilayahnya. Namun secara umum LPE sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, di tengah melemahnya kondisi ekonomi global yang melemah.

Gambar. 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2016), BPS Provinsi Kabupaten Bandung Barat (2016)

Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Bandung Barat tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel. 4.3. Pertumbuhan paling tinggi tahun 2015 berasal dari sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12.20 persen dibandingkan dengan sektor sektor lainnya.

Dari sisi produksi beberapa sektor mengalami percepatan dari tahun 2014 ke tahun 2015, seperti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan sebesar 5.33 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8.95 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7.47 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12.20 persen, sektor Keuangan dan Asuransi sebesar 8.62 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 8.55 persen,

sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2.46, sektor Jasa Pendidikan sebesar 9.79 persen, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10.91 persen, dan sektor Jasa lainnya sebesar 8.57 persen.

Tabel. 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.05	1.95	4.06	3.09	-2.13
Pertambangan dan Penggalian	6.78	1.75	0.64	3.26	-1.6
Industri Pengolahan	7.44	6.26	5.62	5.76	5.7
Pengadaan Listrik dan Gas	6.04	7.02	6.83	5.65	0.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.84	6.71	6.84	1.21	5.33
Konstruksi	7.56	9.25	7.92	8.03	7.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.11	8.24	7.84	7.44	5.15
Transportasi dan Pergudangan	3.53	4.21	4.21	4.15	8.95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.23	7.89	7.61	7.24	7.47
Informasi dan Komunikasi	8.16	5.83	8.18	9.86	12.20
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.99	9.09	11.43	6.1	8.62
Real Estat	5.43	4.83	5.97	5.88	5.34
Jasa Perusahaan	7.23	6.96	7.01	6.23	8.55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.81	2.83	0.2	-1.05	2.46
Jasa Pendidikan	9.51	11.18	10.47	8.15	9.79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.82	9.03	9.75	8.12	10.91
Jasa lainnya	8.09	9.16	7.84	8.27	8.57
Produk Domestik Regional Bruto	5.68	6.04	5.94	5.71	5.01

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Namun beberapa sektor mengalami penurunan pertumbuhan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Real Estat.

Struktur perekonomian yang terbentuk pada suatu daerah menunjukkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia dan sudah terkelola. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral. Indikator tersebut memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-tiap sektor dalam penciptaan nilai tambah. Struktur perekonomian juga akan memberikan gambaran secara umum tentang potensi ekonomi suatu wilayah.

Dalam lima tahun terakhir (2011-2015), Tabel.4.4 menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi, dimana di tahun 2014-2015 posisi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki sumbangan lebih besar dibandingkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan fungsi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan industri-industri di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Struktur ekonomi Provinsi Kabupaten Bandung Barat tahun 2011-2015 seperti ditunjukkan dalam Tabel. 4.4, ternyata sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat, yaitu pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 39.61 persen dan di tahun 2015 sebesar

39.83 persen. Kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB berasal dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0.04 persen pada tahun 2011-2015.

Tabel. 4.4
Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.34	14.75	14.49	14.12	13.16
Pertambangan dan Penggalian	1.48	1.42	1.35	1.32	1.24
Industri Pengolahan	39.61	39.7	39.58	39.57	39.83
Pengadaan Listrik dan Gas	0.78	0.79	0.79	0.79	0.76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Konstruksi	6.73	6.93	7.06	7.21	7.38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.65	13.94	14.19	14.41	14.43
Transportasi dan Pergudangan	5.14	5.05	4.97	4.89	5.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.54	4.62	4.69	4.76	4.87
Informasi dan Komunikasi	1.91	1.9	1.94	2.02	2.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.74	0.76	0.8	0.80	0.83
Real Estat	1.79	1.77	1.77	1.78	1.78
Jasa Perusahaan	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.47	3.36	3.18	2.98	2.90
Jasa Pendidikan	3.01	3.16	3.30	3.43	3.59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.42	0.44	0.45	0.46	0.49
Jasa lainnya	0.93	0.95	0.97	0.99	1.03
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

B.

Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Tipologi Klassen

Metode Tipologi Klassen digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Metode ini, dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Dengan menggunakan Matrix Klassen dapat dilakukan empat pengelompokan sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.

Tabel. 4.5 menyajikan data berupa rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling tinggi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDRB Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar 43.66 persen dan 39.66 persen. Sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling rendah terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDRB Kabupaten Bandung Barat sebesar 0.08 persen dan 0.04 persen. Selain itu, di Provinsi Jawa Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 14.84 persen dan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar -2.39 persen.

Tabel. 4.5
Rata-Rata Laju Pertumbuhan (LP) dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi
Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	Provinsi Jawa Barat		Kab. Bandung Barat	
	Rata-Rata LP (s)	Rata-Rata Kontribusi (sk)	Rata-Rata LP (si)	Rata-Rata Kontribusi (ski)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.08	8.31	1.18	14.37
Pertambangan dan Penggalian	-2.39	2.55	2.17	1.36
Industri Pengolahan	5.62	43.66	6.16	39.66
Pengadaan Listrik dan Gas	4.43	0.53	5.29	0.78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.28	0.08	5.39	0.04
Konstruksi	10.13	7.91	8.06	7.06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.13	16.02	7.16	14.12
Transportasi dan Pergudangan	8.51	4.47	5.01	5.03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.18	2.41	7.69	4.61
Informasi dan Komunikasi	14.84	2.95	8.85	1.99
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.00	2.35	8.85	0.79
Real Estat	7.45	1.15	5.49	1.78
Jasa Perusahaan	9.15	0.39	7.11	0.43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.11	2.11	1.25	3.18
Jasa Pendidikan	13.16	2.41	9.82	3.21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.99	0.65	9.33	0.45
Jasa lainnya	10.12	1.89	8.39	0.97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2016), BPS Kabupaten Bandung Barat (2016)

Sedangkan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi di Kabupaten Bandung Barat adalah Sektor Jasa Pendidikan sebesar 9.82

persen dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah sebesar 1.18 persen.

Tabel. 4.6
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015

<p>Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sector</i>) $si > s$ dan $ski > sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pengadaan Listrik dan Gas - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 	<p>Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>) $si < s$ dan $ski > sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dan Pergudangan - Real Estat - Jasa Perusahaan - Jasa Pendidikan
<p>Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sector</i>) $si > s$ dan $ski < sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan dan Penggalan - Industri Pengolahan - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Jasa Keuangan dan Asuransi 	<p>Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>) $si < s$ dan $ski < sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Konstruksi - Informasi dan Komunikasi - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Jasa lainnya

Tabel. 4.6 menunjukkan bahwa klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2011-2015 berdasarkan Tipologi Klassen, terdapat 4 (empat) sektor yang termasuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor yang mempunyai rata-rata pertumbuhan sektor dan kontribusi sektor lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Listrik dan

Gas; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut, merupakan sektor yang sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk dikembangkan. Maka sebaiknya anggaran pengeluaran diprioritaskan pada sektor tersebut. Selain itu, keempat sektor yang termasuk ke dalam kuadran maju dan tumbuh pesat sudah terbukti kontribusinya bagi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Apabila pemerintah daerah memberikan stimulasi dana dan dorongan dengan kebijakan yang mendukung, maka sektor tersebut akan dapat menyumbang lebih banyak kepada perekonomian daerah Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa Pendidikan, termasuk dalam kategori sektor maju tapi tertekan yaitu sektor yang mempunyai rata-rata pertumbuhan sektor rendah tapi memiliki rata-rata kontribusi sektor lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Sektor-sektor ini merupakan sektor basis, dimana produk yang dihasilkan tidak hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bandung Barat saja, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain dan sebagai petunjuk bahwa sektor tersebut merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian. Tetapi sektor ini mempunyai rata-rata pertumbuhan sektor rendah dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peningkatan dan kualitas tenaga kerja, dan kurangnya penambahan modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Sementara itu, terdapat empat sektor yang masuk klasifikasi sektor potensial atau masih dapat berkembang yaitu sektor yang mempunyai rata-rata pertumbuhan sektor lebih tinggi tapi memiliki rata-rata kontribusi sektor lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Sektor yang masuk kategori ini adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga hasil produksi barang dan jasa masing-masing sektor dapat meningkat.

Sedangkan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Sektor Jasa Lainnya, masuk kategori empat yaitu sektor relatif tertinggal dimana rata-rata pertumbuhan sektor dan rata-rata kontribusi sektor lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor dan rata-rata kontribusi sektor yang dimiliki Provinsi

Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sektor di Kabupaten Bandung Barat kurang maksimal dalam hasil produksi barang dan jasanya dan pertumbuhan sektornya sangat lambat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah faktor endogen dari sektor itu sendiri yang tidak menguntungkan. Hal ini diperlukan kebijakan atau campur tangan pemerintah antara lain dengan mengadakan peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan sektor-sektor yang relatif tertinggal.

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di Kabupaten Bandung Barat terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Nilai $LQ > 1$ berarti bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bandung Barat saja, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain dan sebagai petunjuk bahwa sektor tersebut merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Sebaliknya bila nilai $LQ < 1$ berarti produk yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bandung Barat. Artinya, sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Dan bila nilai $LQ = 1$

mempunyai arti bahwa sektor tersebut peranannya hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di kabupaten saja.

Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah akan tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan di daerah lain atau surplus.

Tabel. 4.7
Location Quotient (LQ) Rata-Rata Kabupaten Bandung Barat

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	LQ Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.68	1.72	1.71	1.75	1.71	1.714
Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.54	0.55	0.56	0.54	0.536
Industri Pengolahan	0.81	0.92	0.91	0.91	0.92	0.894
Pengadaan Listrik dan Gas	1.47	1.45	1.44	1.44	1.58	1.476
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.492
Konstruksi	0.91	0.88	0.88	0.89	0.91	0.894
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.87	0.85	0.87	0.90	0.91	0.880
Transportasi dan Pergudangan	1.19	1.14	1.13	1.09	1.08	1.126
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.89	1.91	1.97	1.98	1.97	1.944
Informasi dan Komunikasi	0.73	0.61	0.69	0.64	0.62	0.658
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.332
Real Estat	1.58	1.53	1.54	1.56	1.55	1.552
Jasa Perusahaan	1.10	1.01	1.01	1.08	1.09	1.058
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.46	1.45	1.48	1.44	1.40	1.446
Jasa Pendidikan	1.41	1.38	1.40	1.34	1.34	1.374
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.71	0.71	0.73	0.68	0.66	0.698
Jasa lainnya	0.51	0.52	0.52	0.52	0.51	0.516

Berdasarkan Tabel. 4.7 nilai rata-rata LQ pada tabel diatas sektor ekonomi

yang termasuk pada sektor basis di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

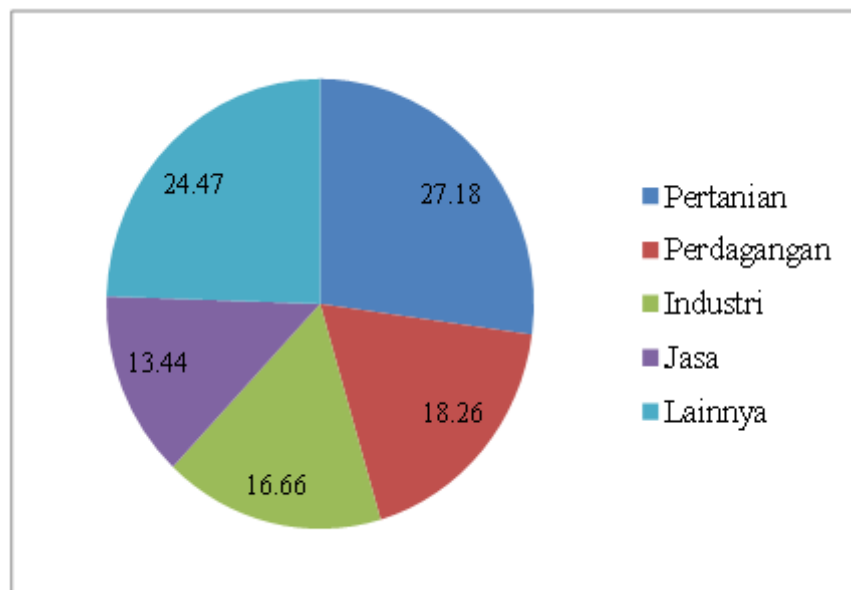
a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Selama periode 2011-2015, nilai koefisien $LQ > 1$, yang artinya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Pesatnya pertumbuhan sektor ini juga dikarenakan ketersediaan kekayaan alam yang melimpah di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan yang subur serta banyak aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Ini lebih dimungkinkan karena Bandung Barat beriklim tropis. Selain itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 memberikan andil terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel dan restoran.

Pertanian yang unggul di Kabupaten Bandung Barat yaitu Padi (tanaman pangan) yang terletak di wilayah Selatan. Kemudian tempat budidaya ikan dengan metode Kolam Jaring Apung (KJA) merupakan subsektor dari sektor perikanan yang unggul di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah ingin mengembangkan Kolam Jaring Apung yang terletak di Waduk Cirata. Wilayah yang potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy yaitu sekitar 59% produksi total produksi KJA (RPJMD, 2013:II-22).

Selain itu, kopi merupakan subsektor yang unggul dalam sektor perkebunan yang dibuktikan dalam kejuaraan nasional yaitu juara 2 nasional produsen terbaik di Sindangkerta. Sedangkan bunga merupakan subsektor yang unggul di sektor perkebunan di Kabupaten Bandung Barat yang terletak di Lembang. Dengan *supply* bunga terbesarnya dari Rawa Belong, Jakarta.

Gambar. 4.4
Persentase Lapangan Pekerjaan
Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Tahun 2012



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat IPM Tahun 2012

Sektor ini pun menyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Penduduk Kabupaten Bandung Barat bisa dikatakan masih bercorak pertanian. Hal ini dapat terlihat dari Gambar. 4.4, penduduk Kabupaten Bandung Barat yang bekerja tersebar diberbagai lapangan pekerjaan dari 577.628 penduduk

yang bekerja, 27.18 persennya bekerja di sektor pertanian, 18.26persen bekerja di sektor perdagangan, 16.66 persen di sektor perdagangan, 13.44 persen di sektor jasa, dan sisanya tersebar di sektor lainnya.

b. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Selama periode 2011-2015 berdasarkan nilai rata-rata koefisien $LQ > 1$, maka artinyakontribusi sektor pengadaan listrik dan gas dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan yang pesat karena didukung oleh meningkatnya kebutuhan listrik dan gas oleh rumah tangga dan industri di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapatan penjualan listrik PLN selama 2013 mencapai Rp. 891,741,932,160,- (Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2014:224).Selain itu, sektor ini memiliki peran yang sangat penting karena sebagai sumber utama energi penggerak mesin-mesin produksi pada industri pengolahan. Untuk itu perlu adanya dorongan yang kuat oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

c. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Berdasarkan nilai rata-rata koefisien $LQ > 1$ selama periode 2011-2015, maka artinya kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Sektor transportasi dan pergudangan mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

Sektor ini berkembang pesat karena didukung oleh dibukanya jalan tol Cipularang yang melintasi Kecamatan Padalarang. Hal ini merupakan salah satu akses vital yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya.

Transportasi Kabupaten Bandung Barat juga didukung dengan keberadaan stasiun kereta api, yaitu Stasiun Padalarang, Stasiun Cipatat dan Rajamandala, Stasiun Rende Cikalong Wetan, serta Stasiun Gadobangkong (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2014).

d. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada periode 2011-2015, nilai koefisien $LQ > 1$, yang artinya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sektor ini berkembang pesat karena didukung oleh sumber daya alam yang dapat dijadikan tempat wisata alam yang menjadi daya tarik pengunjung. Potensi tersebut memungkinkan untuk pengembangan hotel, restoran, atau jasa akomodasi lainnya yang mendukung obyek wisata yang ada.

Berdasarkan Tabel. 4.8 terdapat 42 obyek wisata yang ada dapat menjadi daya tarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kabupaten Bandung Barat belum memiliki bioskop, satu yang menjadi alasan mungkin karena akses menonton ke bioskop ke Kota Bandung relatif terjangkau. Dan di Kabupaten Bandung Barat terdapat 9 kolam renang untuk destinasi pariwisata lainnya.

Tabel. 4.8
Jumlah Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013

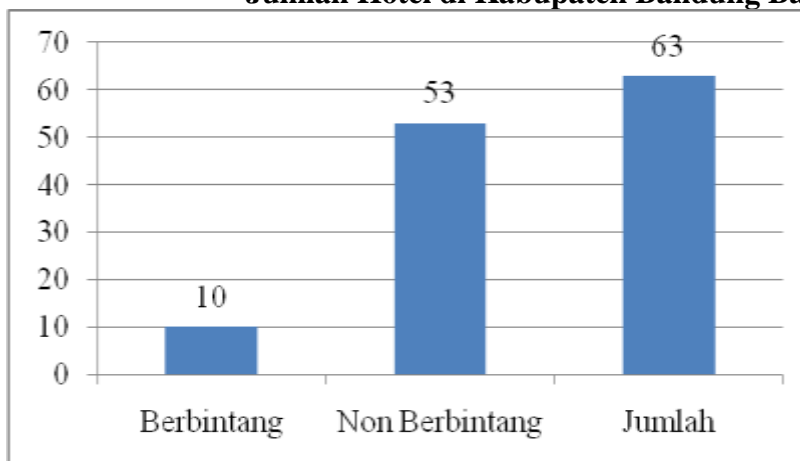
Uraian	2013
Jumlah Obyek Wisata	42
Jumlah Bioskop	0
Kolam Renang	9

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2013

Obyek wisata di Kabupaten Bandung Barat berkembang pesat, khususnya di wilayah utara yaitu Lembang. Kampung

Gajah, Dusun Bambu, Kawasan Ciwangun Indah, Floating Market Farm House, Teropong Bintang Bosscha, The Lodge Maribaya, De Ranch, Terminal Wisata Grafika Cikole, dan wisata lainnya merupakan obyek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Gambar. 4.5
Jumlah Hotel di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013



Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2013

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Sektor tersebut, memungkinkan untuk pengembangan hotel guna mendukung obyek wisata yang ada. Hal ini dapat dilihat oleh Gambar. 4.5. Jumlah hotel di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 63 unit diantaranya jumlah hotel berbintang di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 10 unit dan 53 unit hotel non bintang.

Selain itu, subsektor restoran menunjukkan perkembangan yang relatif lebih baik. Jumlah rumah makan mengalami

peningkatan. Sejalan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ini pun menyerap tenaga kerja terbesar ke dua dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 18.26 persen yang terlihat pada Gambar. 4.4. Kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 memberikan andil terbesar ke dua setelah sektor industri pengolahan. Sektor ini merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Bandung Barat. Dengan sumber daya alam yang cukup menarik dan wilayah yang strategis terutama di wilayah Bandung Barat bagian utara, menjadi determinan terhadap aktivitas sektor ini.

e. Sektor Real Estat

Berdasarkan Tabel. 4.7, nilai koefisien rata-rata $LQ > 1$ selama periode 2011-2015, yang artinya kontribusi sektor Real Estat dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Sektor ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Sektor ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung,

pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Sektor ini berkembang pesat di Kabupaten Bandung Barat dapat dibuktikan dengan adanya beberapa perumahan baru yang dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh, terdapat kawasan Kota Baru Parahyangan di Kecamatan Padalarang. Kemudian banyaknya villa di Kecamatan Lembang, dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa sektor Real Estat merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Bandung Barat.

f. Sektor Jasa Perusahaan

Pada periode 2011-2015, nilai koefisien $LQ > 1$ yang artinya, kontribusi sektor Jasa Perusahaan dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Sektor Jasa Perusahaan mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus. Kegiatan ini antara lain: jasa hukum dan akuntansi; jasa arsitektur dan teknik sipil; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; periklanan dan penelitian pasar; serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya

Selain itu, sektor ini juga mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan ini antara

lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; jasa ketenagakerjaan; jasa agen perjalanan; penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya; jasa keamanan dan penyelidikan; jasa untuk gedung dan pertamanan; jasa administrasi kantor; serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Di Kabupaten Bandung Barat, sektor Jasa Perusahaan juga menjadi sektor unggulan. Hal ini berhubungan dengan sektor pariwisata. Secara tidak langsung, sektor pariwisata dimunculkan peluang usaha bidang jasa travel. Biasanya sektor usaha ini sering kali dimanfaatkan para turis baik turis asing maupun dalam negeri untuk merancang perjalanan wisatanya.

g. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Pada periode 2011-2015, nilai koefisien $LQ > 1$ yang artinya, kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Sektor ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Sektor ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan

peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Tabel. 4.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 dan 2012

INDIKATOR	KONDISI TAHUN	
	2011	2012
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	90	92
Penegakan PERDA (%)	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	100	100
Jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1.480	1.120
Jumlah pos siskamling per 165 desa/kelurahan	25.465	25.465

Sumber: BPS dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor yang andalan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel.4.9, yaitu cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 92% dibandingkan di tahun sebelumnya. Selain itu, penegakan PERDA dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2011 dan 2012, di Kabupaten Bandung Barat mencapai 100%.

Sementara itu, jumlah polisi pamong praja sebanyak 1.480 jiwa di tahun 2011 dan mengalami penurunan sebesar 0.028

persen di tahun 2012 sebanyak 1.120 jiwa. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012, jumlah pos siskamling sebanyak 25.465 unit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat cukup baik.

h. Sektor Jasa Pendidikan

Berdasarkan Tabel. 4.7, nilai koefisien rata-rata $LQ > 1$ selama periode 2011-2015, yang artinya kontribusi sektor Jasa Pendidikan dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Sektor ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Sektor ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic needs) untuk setiap manusia, karena pendidikan merupakan sasaran utama untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik.

Sektor pendidikan menjadi sektor andalan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya SD di Bandung Barat tahun 2015/2016 sebanyak 286 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 15.918 dan jumlah SMP sebanyak 160 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 60.474 (KBBDA, 2016:72).

Tabel. 4.10
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru Menurut Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015/2016

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid		Total	Jumlah Guru
		Laki-laki	Perempuan		
SMA	48	5.142	6.838	11.980	984
SMK	81	7.210	4.735	11.945	859

Sumber: Dinas Pendidikan dan Cabang Diknas Pendidikan Se-Kabupaten Bandung Barat

Selain itu, berdasarkan Tabel. 4.10, yaitu terdapatnya jumlah SMA sebanyak 48 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 11.980 terdiri dari laki-laki sebanyak 5.142 dan perempuan sebanyak 6.838. Dan terdapat jumlah SMK sebanyak 81 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 11.945 terdiri dari laki-laki sebanyak 7.210 dan perempuan sebanyak 4.735. Kemudian terdapat jumlah guru di SMA dan SMK, masing-masing sebanyak 984 guru dan 859 guru. Dengan terdapat banyaknya fasilitas sekolah dan tenaga

pendidik tersebut, tentunya sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang berpotensi.

Berdasarkan analisis LQ pada Tabel. 4.7, adapun sektor-sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat yang termasuk ke dalam sektor non basis yaitu: Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa lainnya.

3. Analisis *Shift-Share*

Analisis *Shift-Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat dalam kurun tahun 2011-2015. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Analisis *Shift-Share* dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat.

Pertumbuhan PDRB total (Y) dapat diuraikan menjadi komponen shift dan komponen share yaitu:

- a. Komponen National Share (NS_i) adalah banyaknya pertambahan PDRB Kabupaten Bandung Barat seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB Provinsi Jawa Barat selama periode waktu tertentu.
- b. Komponen Proportional Shift (Pr_i) mengukur besarnya *shift netto* Kabupaten Bandung Barat yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Kabupaten Bandung Barat yang berubah. Apabila Pr_i bernilai positif artinya Kabupaten Bandung Barat terspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Jawa Barat tumbuh cepat dan apabila Pr_i bernilai negatif berarti Kabupaten Bandung Barat berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Provinsi Jawa Barat pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun.
- c. Komponen Differential Shift (Dr_i) menghasilkan besarnya *shiftnetto* sebagai akibat dari PDRB Kabupaten Bandung Barat berubah. Apabila Dr_i bernilai positif pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan Dr_i bernilai negatif pada sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Hasil perhitungan analisis *shift-share* dicantumkan pada Tabel. 4.12. Berdasarkan Tabel. 4.11, pertumbuhan komponen Proportional Shift (Pr_i) Kabupaten Bandung Barat selama periode tahun 2011-2015 ada yang bernilai negatif dan positif.

Tabel. 4.11
Hasil Perhitungan Nilai Shift-Share
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha	NS	Pr	Dr	ΔY
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3455272.27	-144847.95	13,143.96	3,323,568.28
Pertambangan dan Penggalian	328157.35	-22020.07	7,309.80	313,447.08
Industri Pengolahan	9344188.15	-34812.78	46,027.28	9,355,402.65
Pengadaan Listrik dan Gas	185825.09	-4823.85	3,511.83	184,513.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9045.29	54.61	-119.95	8,979.95
Konstruksi	1649520.66	35459.90	2,726.12	1,687,706.68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3317388.45	2028.62	41,565.61	3,360,982.68
Transportasi dan Pergudangan	1181557.41	25803.08	-28,654.18	1,178,706.40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1098271.90	8384.73	10,860.70	1,117,517.33
Informasi dan Komunikasi	458659.61	34528.81	-19,195.00	473,993.60
Jasa Keuangan dan Asuransi	182735.91	4112.67	1,157.45	188,006.03
Real Estat	419672.66	676.81	-1,418.70	418,930.77
Jasa Perusahaan	100292.07	1840.23	-390.77	101,741.53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	763312.23	-25958.05	-7,537.13	729,817.06
Jasa Pendidikan	763159.75	45313.12	-11,587.37	796,885.49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104683.56	5892.05	-2,111.03	108,464.58

Jasa lainnya	227207.92	5983.35	-38.77	233,152.50
--------------	-----------	----------------	--------	------------

Sektor-sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan Pr_i positif dimana Kabupaten Bandung Barat terspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Jawa Barat tumbuh cepat, yaitu: Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa lainnya.

Prioritas pembangunan ekonomi daerah harus difokuskan kepada sektor-sektor ini. Sehingga, akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai nilai komponen pertumbuhan Pr_i negatif, berarti Kabupaten Bandung Barat berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Provinsi Jawa Barat pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun. Sektor tersebut antara lain: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Pengalihan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Perekonomian kelima sektor tersebut tumbuh lambat dibandingkan dengan perekonomian sektor di Provinsi Jawa Barat. Apabila merujuk

kepada Tabel. 4.5 yaitu rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Bandung Barat, kelima sektor tersebut memiliki rata-rata laju pertumbuhan terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan sektor yang lebih baik diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penambahan modal atau investasi, dan peningkatan pendapatan.

Nilai Differential Shift (Dr_i) sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat selama periode tahun 2011-2015 ada yang positif dan negatif. Nilai Dr_i positif, berarti sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan nilai Dr_i negatif, berarti sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Terdapat 7 (tujuh) sektor dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan nilai Dr_i positif, yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Ketujuh sektor tersebut mampu melayani kebutuhan dalam dan luar daerah Kabupaten Bandung Barat. Dalam segi inovasi, mutu pelayanan dan pemasaran, sektor ini lebih unggul dibandingkan dengan sektor lainnya. Prioritas pembangunan ekonomi daerah haruslah diletakkan pada sektor-sektor mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, tidak hanya didasarkan pada kandungan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga

memperhatikan infrastruktur, teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sektor tersebut. Dengan demikian, produk-produk yang dihasilkan oleh suatu daerah akan mempunyai daya saing yang tinggi. Sehingga, sektor ini berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan 10 (sepuluh) sektor lainnya, yaitu Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa lainnya memiliki nilai D_i negatif, sehingga sektor-sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan Kabupaten Bandung Barat yang bersifat *intern* dan *ekstern*. Di mana *proportional shift* pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja dalam Kabupaten Bandung Barat. Dan *differential shift* adalah akibat dan pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam Kabupaten Bandung Barat.

4. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun daerah untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan pada tingkat daerah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi

pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan untuk masing-masing daerah.

Prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat haruslah di dasarkan pada pengembangan sektor potensial, tidak hanya di dasarkan pada sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga produk yang dihasilkan akan mempunyai daya saing yang tinggi, karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat.

Analisis penentuan sektor potensial diperlukan sebagai dasar untuk perumusan pola kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat di masa mendatang, sehingga kebijaksanaan pembangunan ekonomi dapat di arahkan untuk menggerakkan sektor-sektor tersebut. Perencanaan harus didukung dengan data yang akurat dan analisis yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tepat menentukan alokasi dan prioritas anggaran untuk sektor potensial secara signifikan untuk memacu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel. 4.12, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menitikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia yang didukung dengan pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Selain itu, kebijakan memperkuat dimensi pembangunan yang harmonis, kerukunan dan berkeadilan. Serta, kebijakan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakkan supremasi hukum, berkeadilan, dan partisipatif.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat menurut Rencana Induk Pembangunan Ekonomi (RIPE), lebih difokuskan pada pengoptimalan potensi daerah yang dimiliki, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi daerah, serta meningkatkan kapasitas investasi di daerah dan menjalin kerja sama antardaerah.

Tabel. 4.12

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Menurut RPJMD dan RIPE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Rencana Induk Pembangunan Ekonomi (RIPE)
<p>a. Kebijakan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara merata.</p> <p>b. Kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti program-program pengembangan ekonomi kerakyatan, perbaikan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.</p> <p>c. Kebijakan memperkuat dimensi pembangunan yang harmonis, kerukunan dan berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah.</p> <p>d. Kebijakan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakkan supremasi hukum, berkeadilan, dan partisipatif. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.</p>	<p>a. Kebijakan pembangunan KBB dalam waktu 20 tahun ke depan harus lebih difokuskan pada pengelolaan potensi lokal yang dimiliki, yakni sektor pertanian, industri kecil dan menengah, sektor perdagangan serta jasa, terutama jasa pariwisata.</p> <p>b. Untuk mengembangkan potensi agrobisnis serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi daerah, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan KBB setidaknya memiliki empat modal dasar yang kuat, yakni kedudukan KBB yang strategis, berada dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi jalur perlintasan menuju daerah lain di Jabar. Kemudian memiliki sumber daya alam dan sumber energi potensial yang memberikan nilai tambah. Juga sumber daya pariwisata yang cukup memadai, juga karakteristik masyarakatnya yang religius, harmonis, bersikap terbuka, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dengan mudah.</p> <p>c. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi daerah, harus terjalin kemitraan antara pengusaha besar dengan industri kecil dan menengah. Serta meningkatkan kapasitas investasi di daerah dan menjalin kerja sama antardaerah.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan tentang analisis penentuan sektor potensial dalam perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Klasifikasi pola dan struktur pertumbuhan sektor di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
2. Sektor basis dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan perhitungan Location Quotient (LQ). Sektor yang merupakan sektor basis, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan.
3. Hasil analisis *Shift-Share* di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

4. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat lebih difokuskan pada pengoptimalan potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam upaya mengembangkan potensi daerah agar lebih mengutamakan pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor-sektor ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik, meningkatkan pengembangan teknologi dan mempermudah masuknya penanaman modal baik domestik maupun asing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.
2. Bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, disarankan agar dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah disesuaikan dengan potensi ekonomi yang unggul di Kabupaten Bandung Barat sehingga akan mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien.

3. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam memperhatikan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan serta sebagai prioritas pembangunan masing-masing sektor.
4. Bagi penelitian selanjutnya, mengingat masih adanya alat analisis lainnya maka diharapkan dapat menjadikan pertimbangan untuk melanjutkan dan lebih menguatkan penelitian ini menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Almulaibari, Hilal. “*Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2004-2008*” Skripsi S-1 Jurusan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 2011
- Basuki, A.T., Gayatri, U. “*Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir*”. Dalam jurnal ekonomi dan studi pembangunan Vol X No.1, 2013. h. 34-50
- Bappeda Kabupaten Bandung Barat. “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018*”. 2013
- Bappeda Kabupaten Bandung Barat. “*Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat*”.
- BPS. “*Statistik Daerah Kabupaten Bandung Barat 2013*”. BPS Kabupaten Bandung Barat, 2014
- BPS. “*Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*”. BPS Provinsi Jawa Barat, 2015
- BPS. “*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2014*”. BPS Kabupaten Bandung Barat, 2014.
- BPS. “*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2016*”. BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016.
- BPS. “*Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014*”. BPS Kabupaten Bandung Barat, 2015
- BPS. “*Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2016*”. BPS Provinsi Jawa Barat, 2016
- BPS. “*Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015*”. BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016
- Indraprahasta, Galuh Syahbana. “*Strategi Pengembangan Wilayah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Bandung Barat)*”. Tesis S-2 Jurusan Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor. 2009
- Kurniasih, D., Rusfiana, Y. “*Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat*”. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume XI No.1, 2016. h. 12-20

- Muzayanah. “*Terapan Teori Lokasi Industri (Contoh Kasus Pengembangan Kawasan Industri Kragilan Kabupaten Serang)*”. Dalam jurnal geografi Volume XIII No.2, 2015
- Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin. “*Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik*”. Dalam jurnal elektronik mahasiswa jurusan administrasi publik Vol I No.1, 2013
- Nisa, Hoirun. “*Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten*” Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2014
- Nurdiana, Defi. “*Analisis Potensi Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial Kabupaten Ponorogo*” Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2016
- Pahlevi, Nevi. “*Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak (STUDI KASUS: Kawasan Agropolitan Kecamatan Wanasalam)*” Tesis S-2 Jurusan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Jakarta. 2011
- Putra, Aditya Nugraha. “*Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013
- Rozi, Fatchur. “*Analisis Location Quotient dan Shift Share Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2014*” Makalah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2015
- Sarwedi. “*Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya*”. Dalam jurnal akutansi dan keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya Vol IV No.1, 2002
- Sjafrizal. “*Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*”. Padang: Praninta Offset. 2008
- Sjafrizal. “*Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*”. Rajawali Pers. 2014
- Sofiyanto. “*Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang (Pendekatan Location Quotient dan Shift Share Analysis)*” Skripsi S-1 Jurusan Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015
- Suherty, Lina. “*Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Barito Kuala*”. Dalam jejak Vol XII No.2, 2011

Lampiran I

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	88,386,512.4	88,409,460.0	92,390,134.9	92,926,201.1	93,036,099.4
Pertambangan dan Penggalian	29,105,485.8	27,213,582.3	26,872,467.2	27,293,420.3	27,440,068.1
Industri Pengolahan	426,184,947.5	445,675,276.6	477,714,072.3	502,124,367.8	524,315,185.4
Pengadaan Listrik dan Gas	5,126,004.9	5,571,250.1	6,025,232.0	6,313,726.9	5,799,503.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	741,338.8	794,326.7	845,969.6	896,263.8	948,977.8
Konstruksi	71,723,223.4	81,197,699.6	87,818,637.1	92,603,491.6	98,138,048.6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	151,107,155.3	168,938,936.0	177,747,518.2	183,626,109.0	190,349,814.0
Transportasi dan Pergudangan	41,660,006.8	45,721,399.3	47,965,848.6	51,697,901.3	56,650,971.8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23,196,039.4	24,806,717.8	25,985,297.7	27,545,028.8	29,776,546.2
Informasi dan Komunikasi	25,378,259.3	28,094,004.5	30,651,836.8	36,005,412.4	41,878,751.6
Jasa Keuangan dan Asuransi	21,567,179.5	23,437,318.8	26,347,771.9	27,497,251.4	29,521,633.8
Real Estat	10,992,679.3	11,916,840.6	12,561,546.4	13,121,319.4	13,837,689.5
Jasa Perusahaan	3,676,296.2	3,957,451.8	4,265,893.3	4,561,081.0	4,932,613.4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,939,998.9	23,901,327.9	23,568,018.4	23,676,877.0	24,951,869.9
Jasa Pendidikan	20,596,756.1	23,608,192.7	25,715,274.3	29,424,905.7	32,422,181.3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,790,041.1	6,303,721.1	6,720,170.3	7,780,534.3	8,880,758.3
Jasa lainnya	17,450,136.6	18,862,233.8	20,347,857.0	22,137,540.0	24,120,774
Produk Domestik Regional Bruto	965,622,061.1	1,028,409,739.5	1,093,543,545.9	1,149,231,431.8	1,207,001,487.1

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2016

Lampiran II

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,132,147.2	3,193,260.2	3,322,922.6	3,425,444.8	3,352,645.5
Pertambangan dan Penggalian	302,890.1	308,184.3	310,164.5	320,282.0	315,157.5
Industri Pengolahan	8,088,088.1	8,594,751.8	9,078,084.0	9,600,667.4	10,148,107.4
Pengadaan Listrik dan Gas	159,061.8	170,223.2	181,849.5	192,123.9	193,855.7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,848.9	8,375.5	8,948.4	9,056.6	9,539.3
Konstruksi	1,373,595.6	1,500,653.2	1,619,504.9	1,749,551.2	1,881,117.4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,787,875.0	3,017,460.5	3,254,171.4	3,496,196.9	3,676,101.9
Transportasi dan Pergudangan	1,049,714	1,093,928.9	1,140,006.9	1,187,303.3	1,293,586.5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	926,783.3	999,903.5	1,076,038.3	1,153,967.3	1,240,160.2
Informasi dan Komunikasi	389,141.2	411,837.7	445,526.1	489,454.9	549,155.7
Jasa Keuangan dan Asuransi	150,493.0	164,166.9	182,935.1	194,093.1	210,829.0
Real Estat	366,326.4	384,019.9	406,945.9	430,874.3	453,883.0
Jasa Perusahaan	85,678.7	91,642	98,066.1	104,175.6	113,082.4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	708,069.9	728,087.5	729,568.30	721,926.5	739,685.9
Jasa Pendidikan	615,623.3	684,448.9	756,108.50	832,715.8	914,268.8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,501.7	94,314.5	103,509.1	111,914.1	124,120.6
Jasa lainnya	189,276.3	206,620.4	222,820.1	241,247.3	261,922.2
Produk Domestik Regional Bruto	20,419,114.5	21,651,879.0	22,937,169.4	24,260,995.1	25,477,219.0

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Lampiran III

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.15	8.60	8.44	8.09	7.71
Pertambangan dan Penggalian	3.01	2.65	2.46	2.37	2.27
Industri Pengolahan	44.14	43.34	43.68	43.69	43.44
Pengadaan Listrik dan Gas	0.53	0.54	0.55	0.55	0.48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Konstruksi	7.43	7.90	8.03	8.06	8.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.65	16.43	16.25	15.98	15.77
Transportasi dan Pergudangan	4.31	4.45	4.39	4.50	4.69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.40	2.41	2.38	2.40	2.47
Informasi dan Komunikasi	2.63	2.73	2.80	3.13	3.47
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.23	2.28	2.42	2.39	2.45
Real Estat	1.14	1.16	1.15	1.14	1.15
Jasa Perusahaan	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.38	2.32	2.16	2.06	2.07
Jasa Pendidikan	2.13	2.30	2.35	2.56	2.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.60	0.61	0.61	0.68	0.74
Jasa lainnya	1.81	1.83	1.86	1.93	2.00
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2016

Lampiran IV

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.34	14.75	14.49	14.12	13.16
Pertambangan dan Penggalian	1.48	1.42	1.35	1.32	1.24
Industri Pengolahan	39.61	39.7	39.58	39.57	39.83
Pengadaan Listrik dan Gas	0.78	0.79	0.79	0.79	0.76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Konstruksi	6.73	6.93	7.06	7.21	7.38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.65	13.94	14.19	14.41	14.43
Transportasi dan Pergudangan	5.14	5.05	4.97	4.89	5.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.54	4.62	4.69	4.76	4.87
Informasi dan Komunikasi	1.91	1.9	1.94	2.02	2.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.74	0.76	0.8	0.80	0.83
Real Estat	1.79	1.77	1.77	1.78	1.78
Jasa Perusahaan	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.47	3.36	3.18	2.98	2.90
Jasa Pendidikan	3.01	3.16	3.30	3.43	3.59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.42	0.44	0.45	0.46	0.49
Jasa lainnya	0.93	0.95	0.97	0.99	1.03
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Lampiran V

**Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)
2011-2015**

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.79	0.03	4.50	0.58	0.12
Pertambangan dan Penggalian	-3.39	-6.50	-1.25	1.57	0.54
Industri Pengolahan	5.6	4.57	7.19	5.11	4.42
Pengadaan Listrik dan Gas	-3.91	8.69	8.15	4.79	-8.14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.51	7.15	6.50	5.95	5.88
Konstruksi	13.69	13.21	8.15	5.45	5.98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.18	11.8	5.21	3.31	3.66
Transportasi dan Pergudangan	11.58	9.75	4.91	7.78	9.58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.03	6.94	4.75	6.00	8.10
Informasi dan Komunikasi	22.10	10.7	9.10	17.47	16.31
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.55	8.67	12.42	4.36	7.36
Real Estat	11.53	8.41	5.41	4.46	5.46
Jasa Perusahaan	14.23	7.65	7.79	6.92	8.15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.82	4.19	-1.39	0.46	5.38
Jasa Pendidikan	14.67	14.62	8.93	14.43	10.19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.69	8.87	6.62	15.78	14.14
Jasa lainnya	15.66	8.09	7.88	8.80	8.96
Produk Domestik Regional Bruto	6.50	6.50	6.33	5.09	5.03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2016

Lampiran VI

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen),
2011-2015**

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.05	1.95	4.06	3.09	-2.13
Pertambangan dan Penggalian	6.78	1.75	0.64	3.26	-1.6
Industri Pengolahan	7.44	6.26	5.62	5.76	5.7
Pengadaan Listrik dan Gas	6.04	7.02	6.83	5.65	0.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.84	6.71	6.84	1.21	5.33
Konstruksi	7.56	9.25	7.92	8.03	7.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.11	8.24	7.84	7.44	5.15
Transportasi dan Pergudangan	3.53	4.21	4.21	4.15	8.95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.23	7.89	7.61	7.24	7.47
Informasi dan Komunikasi	8.16	5.83	8.18	9.86	12.2
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.99	9.09	11.43	6.1	8.62
Real Estat	5.43	4.83	5.97	5.88	5.34
Jasa Perusahaan	7.23	6.96	7.01	6.23	8.55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.81	2.83	0.2	-1.05	2.46
Jasa Pendidikan	9.51	11.18	10.47	8.15	9.79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.82	9.03	9.75	8.12	10.91
Jasa lainnya	8.09	9.16	7.84	8.27	8.57
Produk Domestik Regional Bruto	5.68	6.04	5.94	5.71	5.01

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016

Lampiran VII

**Perhitungan Location Quotient (LQ)
Kabupaten Bandung Barat**

Tahun 2011

PDRB 17 Sektor Bandung Barat	Total PDRB Bandung Barat	PDRB 17 Sektor Jawa Barat	Total PDRB Jawa Barat	LQ
3,132,147.2	20,419,114.5	88,386,512.4	965,622,061.1	1.68
302,890.1	20,419,114.5	29,105,485.8	965,622,061.1	0.49
8,088,088.1	20,419,114.5	426,184,947.5	965,622,061.1	0.81
159,061.8	20,419,114.5	5,126,004.9	965,622,061.1	1.47
7,848.9	20,419,114.5	741,338.8	965,622,061.1	0.50
1,373,595.6	20,419,114.5	71,723,223.4	965,622,061.1	0.91
2,787,875.0	20,419,114.5	151,107,155.3	965,622,061.1	0.87
1,049,714	20,419,114.5	41,660,006.8	965,622,061.1	1.19
926,783.3	20,419,114.5	23,196,039.4	965,622,061.1	1.89
389,141.2	20,419,114.5	25,378,259.3	965,622,061.1	0.73
150,493.0	20,419,114.5	21,567,179.5	965,622,061.1	0.33
366,326.4	20,419,114.5	10,992,679.3	965,622,061.1	1.58
85678.7	20,419,114.5	3,676,296.2	965,622,061.1	1.10
708,069.9	20,419,114.5	22,939,998.9	965,622,061.1	1.46
615,623.3	20,419,114.5	20,596,756.1	965,622,061.1	1.41
86,501.7	20,419,114.5	5,790,041.1	965,622,061.1	0.71
189,276.3	20,419,114.5	17,450,136.6	965,622,061.1	0.51

Tahun 2012

PDRB 17 Sektor Bandung Barat	Total PDRB Bandung Barat	PDRB 17 Sektor Jawa Barat	Total PDRB Jawa Barat	LQ
3,193,260.2	21,651,879.0	88,409,460.0	1,028,409,739.5	1.72
308,184.3	21,651,879.0	27,213,582.3	1,028,409,739.5	0.54
8,594,751.8	21,651,879.0	445,675,276.6	1,028,409,739.5	0.92
170,223.2	21,651,879.0	5,571,250.1	1,028,409,739.5	1.45
8,375.5	21,651,879.0	794,326.7	1,028,409,739.5	0.50
1,500,653.2	21,651,879.0	81,197,699.6	1,028,409,739.5	0.88
3,017,460.5	21,651,879.0	168,938,936.0	1,028,409,739.5	0.85
1,093,928.9	21,651,879.0	45,721,399.3	1,028,409,739.5	1.14
999,903.5	21,651,879.0	24,806,717.8	1,028,409,739.5	1.91
411,837.7	21,651,879.0	28,094,004.5	1,028,409,739.5	0.61
164,166.9	21,651,879.0	23,437,318.8	1,028,409,739.5	0.33
384,019.9	21,651,879.0	11,916,840.6	1,028,409,739.5	1.53
91642	21,651,879.0	3,957,451.8	1,028,409,739.5	1.01
728,087.5	21,651,879.0	23,901,327.9	1,028,409,739.5	1.45
684,448.9	21,651,879.0	23,608,192.7	1,028,409,739.5	1.38
94,314.5	21,651,879.0	6,303,721.1	1,028,409,739.5	0.71
206,620.4	21,651,879.0	18,862,233.8	1,028,409,739.5	0.52

Tahun 2013

PDRB 9 Sektor Bandung Barat	Total PDRB Bandung Barat	PDRB 9 Sektor Jawa Barat	Total PDRB Jawa Barat	LQ
3,322,922.6	22,937,169.4	92,390,134.9	1,093,543,545.9	1.71
310,164.5	22,937,169.4	26,872,467.2	1,093,543,545.9	0.55
9,078,084.0	22,937,169.4	477,714,072.3	1,093,543,545.9	0.91
181,849.5	22,937,169.4	6,025,232.0	1,093,543,545.9	1.44
8,948.4	22,937,169.4	845,969.6	1,093,543,545.9	0.50
1,619,504.9	22,937,169.4	87,818,637.1	1,093,543,545.9	0.88
3,254,171.4	22,937,169.4	177,747,518.2	1,093,543,545.9	0.87
1,140,006.9	22,937,169.4	47,965,848.6	1,093,543,545.9	1.13
1,076,038.3	22,937,169.4	25,985,297.7	1,093,543,545.9	1.97
445,526.1	22,937,169.4	30,651,836.8	1,093,543,545.9	0.69
182,935.1	22,937,169.4	26,347,771.9	1,093,543,545.9	0.33
406,945.9	22,937,169.4	12,561,546.4	1,093,543,545.9	1.54
98066.1	22,937,169.4	4,265,893.3	1,093,543,545.9	1.01
729,568.30	22,937,169.4	23,568,018.4	1,093,543,545.9	1.48
756,108.50	22,937,169.4	25,715,274.3	1,093,543,545.9	1.40
103,509.1	22,937,169.4	6,720,170.3	1,093,543,545.9	0.73
222,820.1	22,937,169.4	20,347,857.0	1,093,543,545.9	0.52

Tahun 2014

PDRB 9 Sektor Bandung Barat	Total PDRB Bandung Barat	PDRB 9 Sektor Jawa Barat	Total PDRB Jawa Barat	LQ
3,425,444.8	24,260,995.1	92,926,201.1	1,149,231,431.8	1.75
320,282.0	24,260,995.1	27,293,420.3	1,149,231,431.8	0.56
9,600,667.4	24,260,995.1	502,124,367.8	1,149,231,431.8	0.91
192,123.9	24,260,995.1	6,313,726.9	1,149,231,431.8	1.44
9,056.6	24,260,995.1	896,263.8	1,149,231,431.8	0.48
1,749,551.2	24,260,995.1	92,603,491.6	1,149,231,431.8	0.89
3,496,196.9	24,260,995.1	183,626,109.0	1,149,231,431.8	0.90
1,187,303.3	24,260,995.1	51,697,901.3	1,149,231,431.8	1.09
1,153,967.3	24,260,995.1	27,545,028.8	1,149,231,431.8	1.98
489,454.9	24,260,995.1	36,005,412.4	1,149,231,431.8	0.64
194,093.1	24,260,995.1	27,497,251.4	1,149,231,431.8	0.33
430,874.3	24,260,995.1	13,121,319.4	1,149,231,431.8	1.56
104175.6	24,260,995.1	4,561,081.0	1,149,231,431.8	1.08
721,926.5	24,260,995.1	23,676,877.0	1,149,231,431.8	1.44
832,715.8	24,260,995.1	29,424,905.7	1,149,231,431.8	1.34
111,914.1	24,260,995.1	7,780,534.3	1,149,231,431.8	0.68
241,247.3	24,260,995.1	22,137,540.0	1,149,231,431.8	0.52

Tahun 2015

PDRB 9 Sektor Bandung Barat	Total PDRB Bandung Barat	PDRB 9 Sektor Jawa Barat	Total PDRB Jawa Barat	LQ
3,352,645.5	25,477,219.0	93,036,099.4	1,207,001,487.1	1.71
315,157.5	25,477,219.0	27,440,068.1	1,207,001,487.1	0.54
10,148,107.4	25,477,219.0	524,315,185.4	1,207,001,487.1	0.92
193,855.7	25,477,219.0	5,799,503.9	1,207,001,487.1	1.58
9,539.3	25,477,219.0	948,977.8	1,207,001,487.1	0.48
1,881,117.4	25,477,219.0	98,138,048.6	1,207,001,487.1	0.91
3,676,101.9	25,477,219.0	190,349,814.0	1,207,001,487.1	0.91
1,293,586.5	25,477,219.0	56,650,971.8	1,207,001,487.1	1.08
1,240,160.2	25,477,219.0	29,776,546.2	1,207,001,487.1	1.97
549,155.7	25,477,219.0	41,878,751.6	1,207,001,487.1	0.62
210,829.0	25,477,219.0	29,521,633.8	1,207,001,487.1	0.34
453,883.0	25,477,219.0	13,837,689.5	1,207,001,487.1	1.55
113,082.4	25,477,219.0	4,932,613.4	1,207,001,487.1	1.09
739,685.9	25,477,219.0	24,951,869.9	1,207,001,487.1	1.40
914,268.8	25,477,219.0	32,422,181.3	1,207,001,487.1	1.34
124,120.6	25,477,219.0	8,880,758.3	1,207,001,487.1	0.66
261,922.2	25,477,219.0	24,120,774	1,207,001,487.1	0.51

Location Quotient (LQ) Rata-Rata

Kabupaten Bandung Barat

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	LQ Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.68	1.72	1.71	1.75	1.71	1.714
Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.54	0.55	0.56	0.54	0.536
Industri Pengolahan	0.81	0.92	0.91	0.91	0.92	0.894
Pengadaan Listrik dan Gas	1.47	1.45	1.44	1.44	1.58	1.476
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.492
Konstruksi	0.91	0.88	0.88	0.89	0.91	0.894
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.87	0.85	0.87	0.90	0.91	0.880
Transportasi dan Pergudangan	1.19	1.14	1.13	1.09	1.08	1.126
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.89	1.91	1.97	1.98	1.97	1.944
Informasi dan Komunikasi	0.73	0.61	0.69	0.64	0.62	0.658
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.332
Real Estat	1.58	1.53	1.54	1.56	1.55	1.552
Jasa Perusahaan	1.10	1.01	1.01	1.08	1.09	1.058
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.46	1.45	1.48	1.44	1.40	1.446
Jasa Pendidikan	1.41	1.38	1.40	1.34	1.34	1.374
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.71	0.71	0.73	0.68	0.66	0.698
Jasa lainnya	0.51	0.52	0.52	0.52	0.51	0.516

Lampiran VIII

Perhitungan Nasional Share (NS) Kabupaten Bandung Barat

2011-2012

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,t	E N,t-n	NS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,132,147.2	1,028,409,739.5	965,622,061.1	3335808.92
Pertambangan dan Penggalian	302,890.1	1,028,409,739.5	965,622,061.1	322584.934
Industri Pengolahan	8,088,088.1	1,028,409,739.5	965,622,061.1	8614000.15
Pengadaan Listrik dan Gas	159,061.8	1,028,409,739.5	965,622,061.1	169404.481
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,848.9	1,028,409,739.5	965,622,061.1	8359.25931
Konstruksi	1,373,595.6	1,028,409,739.5	965,622,061.1	1462910.96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,787,875.0	1,028,409,739.5	965,622,061.1	2969151.1
Transportasi dan Pergudangan	1,049,714	1,028,409,739.5	965,622,061.1	1117969.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	926,783.3	1,028,409,739.5	965,622,061.1	987045.564
Informasi dan Komunikasi	389,141.2	1,028,409,739.5	965,622,061.1	414444.342
Jasa Keuangan dan Asuransi	150,493.0	1,028,409,739.5	965,622,061.1	160278.512
Real Estat	366,326.4	1,028,409,739.5	965,622,061.1	390146.055
Jasa Perusahaan	85678.7	1,028,409,739.5	965,622,061.1	91249.7892
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	708,069.9	1,028,409,739.5	965,622,061.1	754110.755
Jasa Pendidikan	615,623.3	1,028,409,739.5	965,622,061.1	655652.996
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,501.7	1,028,409,739.5	965,622,061.1	92126.3032
Jasa lainnya	189,276.3	1,028,409,739.5	965,622,061.1	201583.62

2012-2013

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,t	E N,t-n	NS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,193,260.2	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	3395503.71
Pertambangan dan Pengegalian	308,184.3	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	327702.995
Industri Pengolahan	8,594,751.8	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	9139096.02
Pengadaan Listrik dan Gas	170,223.2	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	181004.2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,375.5	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	8905.95802
Konstruksi	1,500,653.2	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	1595696.31
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,017,460.5	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	3208569.82
Transportasi dan Pergudangan	1,093,928.9	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	1163212.33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	999,903.5	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	1063231.88
Informasi dan Komunikasi	411,837.7	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	437921.231
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,166.9	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	174564.327
Real Estat	384,019.9	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	408341.605
Jasa Perusahaan	91642	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	97446.0993
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	728,087.5	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	774200.551
Jasa Pendidikan	684,448.9	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	727798.122
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,314.5	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	100287.861
Jasa lainnya	206,620.4	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	219706.598

2013-2014

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,t	E N,t-n	NS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,322,922.6	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	3492139.94
Pertambangan dan Pengegalian	310,164.5	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	325959.395
Industri Pengolahan	9,078,084.0	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	9540378.63
Pengadaan Listrik dan Gas	181,849.5	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	191110.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,948.4	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	9404.09057
Konstruksi	1,619,504.9	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	1701976.97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,254,171.4	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	3419887.64
Transportasi dan Pergudangan	1,140,006.9	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	1198060.9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,076,038.3	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	1130834.74
Informasi dan Komunikasi	445,526.1	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	468214.183
Jasa Keuangan dan Asuransi	182,935.1	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	192250.933
Real Estat	406,945.9	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	427669.315
Jasa Perusahaan	98066.1	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	103060.043
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	729,568.30	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	766721.019
Jasa Pendidikan	756,108.50	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	794612.759
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,509.1	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	108780.223
Jasa lainnya	222,820.1	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	234167.047

2014-2015

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,t	E N,t-n	NS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,425,444.8	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	3597636.52
Pertambangan dan Pengeksploasian	320,282.0	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	336382.072
Industri Pengolahan	9,600,667.4	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	10083277.8
Pengadaan Listrik dan Gas	192,123.9	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	201781.666
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,056.6	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	9511.86103
Konstruksi	1,749,551.2	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	1837498.39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,496,196.9	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	3671945.22
Transportasi dan Pergudangan	1,187,303.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	1246987.17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,153,967.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	1211975.42
Informasi dan Komunikasi	489,454.9	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	514059.027
Jasa Keuangan dan Asuransi	194,093.1	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	203849.855
Real Estat	430,874.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	452533.673
Jasa Perusahaan	104175.6	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	109412.343
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	721,926.5	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	758216.609
Jasa Pendidikan	832,715.8	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	874575.113
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,914.1	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	117539.846
Jasa lainnya	241,247.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	253374.422

Perhitungan Rata-Rata Nasional Share (NS) Kabupaten Bandung Barat

Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	Rata-Rata NS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3335808.92	3395503.71	3492139.94	3597636.52	3455272.27
Pertambangan dan Penggalian	322584.934	327702.995	325959.395	336382.072	328157.35
Industri Pengolahan	8614000.15	9139096.02	9540378.63	10083277.8	9344188.15
Pengadaan Listrik dan Gas	169404.481	181004.2	191110.05	201781.666	185825.09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8359.25931	8905.95802	9404.09057	9511.86103	9045.29
Konstruksi	1462910.96	1595696.31	1701976.97	1837498.39	1649520.66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2969151.1	3208569.82	3419887.64	3671945.22	3317388.45
Transportasi dan Pergudangan	1117969.59	1163212.33	1198060.9	1246987.17	1181557.41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	987045.564	1063231.88	1130834.74	1211975.42	1098271.90
Informasi dan Komunikasi	414444.342	437921.231	468214.183	514059.027	458659.61
Jasa Keuangan dan Asuransi	160278.512	174564.327	192250.933	203849.855	182735.91
Real Estat	390146.055	408341.605	427669.315	452533.673	419672.66
Jasa Perusahaan	91249.7892	97446.0993	103060.043	109412.343	100292.07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	754110.755	774200.551	766721.019	758216.609	763312.23
Jasa Pendidikan	655652.996	727798.122	794612.759	874575.113	763159.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92126.3032	100287.861	108780.223	117539.846	104683.56
Jasa lainnya	201583.62	219706.598	234167.047	253374.422	227207.92

Lampiran IX

Perhitungan Proporsional Shift (Pr) Kabupaten Bandung Barat

2011-2012

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,i,t	E N,i,t-n	E N,t	E N,t-n	Pr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,132,147.2	88,409,460.0	88,386,512.4	1,028,409,739.5	965,622,061.1	-202848.529
Pertambangan dan Penggalian	302,890.1	27,213,582.3	29,105,485.8	1,028,409,739.5	965,622,061.1	-39383.1788
Industri Pengolahan	8,088,088.1	445,675,276.6	426,184,947.5	1,028,409,739.5	965,622,061.1	-156026.86
Pengadaan Listrik dan Gas	159,061.8	5,571,250.1	5,126,004.9	1,028,409,739.5	965,622,061.1	3473.4396
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,848.9	794,326.7	741,338.8	1,028,409,739.5	965,622,061.1	50.6483267
Konstruksi	1,373,595.6	81,197,699.6	71,723,223.4	1,028,409,739.5	965,622,061.1	92133.52703
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,787,875.0	168,938,936.0	151,107,155.3	1,028,409,739.5	965,622,061.1	147714.1182
Transportasi dan Pergudangan	1,049,714	45,721,399.3	41,660,006.8	1,028,409,739.5	965,622,061.1	34079.97899
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	926,783.3	24,806,717.8	23,196,039.4	1,028,409,739.5	965,622,061.1	4091.38758
Informasi dan	389,141.2	28,094,004.5	25,378,259.3	1,028,409,739.5	965,622,061.1	16339.12839

Komunikasi						
Jasa Keuangan dan Asuransi	150,493.0	23,437,318.8	21,567,179.5	1,028,409,739.5	965,622,061.1	3264.079288
Real Estat	366,326.4	11,916,840.6	10,992,679.3	1,028,409,739.5	965,622,061.1	6977.630599
Jasa Perusahaan	85678.7	3,957,451.8	3,676,296.2	1,028,409,739.5	965,622,061.1	981.4421789
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	708,069.9	23,901,327.9	22,939,998.9	1,028,409,739.5	965,622,061.1	-16368.3108
Jasa Pendidikan	615,623.3	23,608,192.7	20,596,756.1	1,028,409,739.5	965,622,061.1	49980.13486
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,501.7	6,303,721.1	5,790,041.1	1,028,409,739.5	965,622,061.1	2049.641693
Jasa lainnya	189,276.3	18,862,233.8	17,450,136.6	1,028,409,739.5	965,622,061.1	3009.267138

2012-2013

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,i,t	E N,i,t-n	E N,t	E N,t-n	Pr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,193,260.2	92,390,134.9	88,409,460.0	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-58465.5585
Pertambangan dan Penggalan	308,184.3	26,872,467.2	27,213,582.3	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-23381.7047
Industri Pengolahan	8,594,751.8	477,714,072.3	445,675,276.6	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	73517.05809
Pengadaan Listrik dan Gas	170,223.2	6,025,232.0	5,571,250.1	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	3089.900211
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,375.5	845,969.6	794,326.7	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	14.07247094

Konstruksi	1,500,653.2	87,818,637.1	81,197,699.6	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	27321.58124
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,017,460.5	177,747,518.2	168,938,936.0	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-33777.0368
Transportasi dan Pergudangan	1,093,928.9	47,965,848.6	45,721,399.3	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-15582.7989
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	999,903.5	25,985,297.7	24,806,717.8	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-15822.4496
Informasi dan Komunikasi	411,837.7	30,651,836.8	28,094,004.5	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	11412.43294
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,166.9	26,347,771.9	23,437,318.8	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	9988.86674
Real Estat	384,019.9	12,561,546.4	11,916,840.6	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-3546.07572
Jasa Perusahaan	91642	4,265,893.3	3,957,451.8	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	1338.425039
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	728,087.5	23,568,018.4	23,901,327.9	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	-56266.3977
Jasa Pendidikan	684,448.9	25,715,274.3	23,608,192.7	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	17739.30353
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,314.5	6,720,170.3	6,303,721.1	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	257.4348997
Jasa lainnya	206,620.4	20,347,857.0	18,862,233.8	1,093,543,545.9	1,028,409,739.5	3187.593821

2013-2014

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,i,t	E N,i,t-n	E N,t	E N,t-n	Pr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,322,922.6	92,926,201.1	92,390,134.9	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-149937.077
Pertambangan dan Penggalian	310,164.5	27,293,420.3	26,872,467.2	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-10936.2152
Industri Pengolahan	9,078,084.0	502,124,367.8	477,714,072.3	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	1578.483972
Pengadaan Listrik dan Gas	181,849.5	6,313,726.9	6,025,232.0	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-553.390517
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,948.4	896,263.8	845,969.6	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	76.30564125
Konstruksi	1,619,504.9	92,603,491.6	87,818,637.1	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	5767.684402
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,254,171.4	183,626,109.0	177,747,518.2	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-58091.9981
Transportasi dan Pergudangan	1,140,006.9	51,697,901.3	47,965,848.6	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	30645.89957
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,076,038.3	27,545,028.8	25,985,297.7	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	9791.247516
Informasi dan Komunikasi	445,526.1	36,005,412.4	30,651,836.8	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	55126.427
Jasa Keuangan dan Asuransi	182,935.1	27,497,251.4	26,347,771.9	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-1334.88683
Real Estat	406,945.9	13,121,319.4	12,561,546.4	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-2588.91797

Jasa Perusahaan	98066.1	4,561,081.0	4,265,893.3	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	1791.952903
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	729,568.30	23,676,877.0	23,568,018.4	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	-33782.9075
Jasa Pendidikan	756,108.50	29,424,905.7	25,715,274.3	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	70570.36341
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,509.1	7,780,534.3	6,720,170.3	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	11061.39774
Jasa lainnya	222,820.1	22,137,540.0	20,347,857.0	1,149,231,431.8	1,093,543,545.9	8251.055462

2014-2015

Lapangan Usaha	E r,i,t-n	E N,i,t	E N,i,t-n	E N,t	E N,t-n	Pr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,425,444.8	93,036,099.4	92,926,201.1	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	-168140.649
Pertambangan dan Penggalian	320,282.0	27,440,068.1	27,293,420.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	-14379.1939
Industri Pengolahan	9,600,667.4	524,315,185.4	502,124,367.8	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	-58319.8201
Pengadaan Listrik dan Gas	192,123.9	5,799,503.9	6,313,726.9	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	-25305.3431
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,056.6	948,977.8	896,263.8	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	77.40537287
Konstruksi	1,749,551.2	98,138,048.6	92,603,491.6	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	16616.80773
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3,496,196.9	190,349,814.0	183,626,109.0	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	-47730.5913

Motor						
Transportasi dan Pergudangan	1,187,303.3	56,650,971.8	51,697,901.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	54069.2398
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,153,967.3	29,776,546.2	27,545,028.8	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	35478.7349
Informasi dan Komunikasi	489,454.9	41,878,751.6	36,005,412.4	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	55237.60907
Jasa Keuangan dan Asuransi	194,093.1	29,521,633.8	27,497,251.4	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	4532.62467
Real Estat	430,874.3	13,837,689.5	13,121,319.4	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	1864.592631
Jasa Perusahaan	104175.6	4,932,613.4	4,561,081.0	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	3249.098106
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	721,926.5	24,951,869.9	23,676,877.0	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	2585.421918
Jasa Pendidikan	832,715.8	32,422,181.3	29,424,905.7	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	42962.66688
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,914.1	8,880,758.3	7,780,534.3	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	10199.72004
Jasa lainnya	241,247.3	24,120,774	22,137,540.0	1,207,001,487.1	1,149,231,431.8	9485.480222

Perhitungan Rata-Rata Proporsional Shift (Pr) Kabupaten Bandung Barat

Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	Rata-Rata Pr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-202848.529	-58465.5585	-149937.077	-168140.649	-144847.95
Pertambangan dan Penggalian	-39383.1788	-23381.7047	-10936.2152	-14379.1939	-22020.07
Industri Pengolahan	-156026.86	73517.05809	1578.483972	-58319.8201	-34812.78
Pengadaan Listrik dan Gas	3473.4396	3089.900211	-553.390517	-25305.3431	-4823.85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.6483267	14.07247094	76.30564125	77.40537287	54.61
Konstruksi	92133.52703	27321.58124	5767.684402	16616.80773	35459.90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147714.1182	-33777.0368	-58091.9981	-47730.5913	2028.62
Transportasi dan Pergudangan	34079.97899	-15582.7989	30645.89957	54069.2398	25803.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4091.38758	-15822.4496	9791.247516	35478.7349	8384.73
Informasi dan Komunikasi	16339.12839	11412.43294	55126.427	55237.60907	34528.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	3264.079288	9988.86674	-1334.88683	4532.62467	4112.67
Real Estat	6977.630599	-3546.07572	-2588.91797	1864.592631	676.81
Jasa Perusahaan	981.4421789	1338.425039	1791.952903	3249.098106	1840.23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-16368.3108	-56266.3977	-33782.9075	2585.421918	-25958.05
Jasa Pendidikan	49980.13486	17739.30353	70570.36341	42962.66688	45313.12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2049.641693	257.4348997	11061.39774	10199.72004	5892.05
Jasa lainnya	3009.267138	3187.593821	8251.055462	9485.480222	5983.35

Lampiran X

Perhitungan Differential Shift (Dr) Kabupaten Bandung Barat

2011-2012

Lapangan Usaha	E r,i,t	E N,i,t	E N,i,t-n	E r,i,t-n	Dr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,193,260.2	88,409,460.0	88,386,512.4	3,132,147.2	60,299.81
Pertambangan dan Penggalian	308,184.3	27,213,582.3	29,105,485.8	302,890.1	24,982.54
Industri Pengolahan	8,594,751.8	445,675,276.6	426,184,947.5	8,088,088.1	136,778.51
Pengadaan Listrik dan Gas	170,223.2	5,571,250.1	5,126,004.9	159,061.8	-2,654.72
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,375.5	794,326.7	741,338.8	7,848.9	-34.41
Konstruksi	1,500,653.2	81,197,699.6	71,723,223.4	1,373,595.6	-54,391.28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,017,460.5	168,938,936.0	151,107,155.3	2,787,875.0	-99,404.72
Transportasi dan Pergudangan	1,093,928.9	45,721,399.3	41,660,006.8	1,049,714	-58,120.67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	999,903.5	24,806,717.8	23,196,039.4	926,783.3	8,766.55
Informasi dan Komunikasi	411,837.7	28,094,004.5	25,378,259.3	389,141.2	-18,945.77
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,166.9	23,437,318.8	21,567,179.5	150,493.0	624.31
Real Estat	384,019.9	11,916,840.6	10,992,679.3	366,326.4	-13,103.79
Jasa Perusahaan	91642	3,957,451.8	3,676,296.2	85678.7	-589.23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	728,087.5	23,901,327.9	22,939,998.9	708,069.9	-9,654.94
Jasa Pendidikan	684,448.9	23,608,192.7	20,596,756.1	615,623.3	-21,184.23

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,314.5	6,303,721.1	5,790,041.1	86,501.7	138.56
Jasa lainnya	206,620.4	18,862,233.8	17,450,136.6	189,276.3	2,027.51

2012-2013

Lapangan Usaha	E r,i,t	E N,i,t	E N,i,t-n	E r,i,t-n	Dr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,322,922.6	92,390,134.9	88,409,460.0	3,193,260.2	-14,115.55
Pertambangan dan Penggalian	310,164.5	26,872,467.2	27,213,582.3	308,184.3	5,843.21
Industri Pengolahan	9,078,084.0	477,714,072.3	445,675,276.6	8,594,751.8	-134,529.08
Pengadaan Listrik dan Gas	181,849.5	6,025,232.0	5,571,250.1	170,223.2	-2,244.60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,948.4	845,969.6	794,326.7	8,375.5	28.37
Konstruksi	1,619,504.9	87,818,637.1	81,197,699.6	1,500,653.2	-3,512.99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,254,171.4	177,747,518.2	168,938,936.0	3,017,460.5	79,378.61
Transportasi dan Pergudangan	1,140,006.9	47,965,848.6	45,721,399.3	1,093,928.9	-7,622.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,076,038.3	25,985,297.7	24,806,717.8	999,903.5	28,628.87
Informasi dan Komunikasi	445,526.1	30,651,836.8	28,094,004.5	411,837.7	-3,807.56
Jasa Keuangan dan Asuransi	182,935.1	26,347,771.9	23,437,318.8	164,166.9	-1,618.09
Real Estat	406,945.9	12,561,546.4	11,916,840.6	384,019.9	2,150.37
Jasa Perusahaan	98066.1	4,265,893.3	3,957,451.8	91642	-718.42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	729,568.30	23,568,018.4	23,901,327.9	728,087.5	11,634.15

Wajib					
Jasa Pendidikan	756,108.50	25,715,274.3	23,608,192.7	684,448.9	10,571.07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,509.1	6,720,170.3	6,303,721.1	94,314.5	2,963.80
Jasa lainnya	222,820.1	20,347,857.0	18,862,233.8	206,620.4	-74.09

2013-2014

Lapangan Usaha	E r,i,t	E N,i,t	E N,i,t-n	E r,i,t-n	Dr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,425,444.8	92,926,201.1	92,390,134.9	3,322,922.6	83,241.93
Pertambangan dan Penggalian	320,282.0	27,293,420.3	26,872,467.2	310,164.5	5,258.82
Industri Pengolahan	9,600,667.4	502,124,367.8	477,714,072.3	9,078,084.0	58,710.29
Pengadaan Listrik dan Gas	192,123.9	6,313,726.9	6,025,232.0	181,849.5	1,567.24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,056.6	896,263.8	845,969.6	8,948.4	-423.80
Konstruksi	1,749,551.2	92,603,491.6	87,818,637.1	1,619,504.9	41,806.54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,496,196.9	183,626,109.0	177,747,518.2	3,254,171.4	134,401.26
Transportasi dan Pergudangan	1,187,303.3	51,697,901.3	47,965,848.6	1,140,006.9	-41,403.50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,153,967.3	27,545,028.8	25,985,297.7	1,076,038.3	13,341.31
Informasi dan Komunikasi	489,454.9	36,005,412.4	30,651,836.8	445,526.1	-33,885.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	194,093.1	27,497,251.4	26,347,771.9	182,935.1	3,177.05
Real Estat	430,874.3	13,121,319.4	12,561,546.4	406,945.9	5,793.90
Jasa Perusahaan	104,175.6	4,561,081.0	4,265,893.3	98,066.1	-676.40

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	721,926.5	23,676,877.0	23,568,018.4	729,568.30	-11,011.61
Jasa Pendidikan	832,715.8	29,424,905.7	25,715,274.3	756,108.50	-32,467.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,914.1	7,780,534.3	6,720,170.3	103,509.1	-7,927.52
Jasa lainnya	241,247.3	22,137,540.0	20,347,857.0	222,820.1	-1,170.80

2014-2015

Lapangan Usaha	E r,i,t	E N,i,t	E N,i,t-n	E r,i,t-n	Dr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,352,645.5	93,036,099.4	92,926,201.1	3,425,444.8	-76,850.37
Pertambangan dan Penggalian	315,157.5	27,440,068.1	27,293,420.3	320,282.0	-6,845.38
Industri Pengolahan	10,148,107.4	524,315,185.4	502,124,367.8	9,600,667.4	123,149.38
Pengadaan Listrik dan Gas	193,855.7	5,799,503.9	6,313,726.9	192,123.9	17,379.38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,539.3	948,977.8	896,263.8	9,056.6	-49.97
Konstruksi	1,881,117.4	98,138,048.6	92,603,491.6	1,749,551.2	27,002.21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,676,101.9	190,349,814.0	183,626,109.0	3,496,196.9	51,887.28
Transportasi dan Pergudangan	1,293,586.5	56,650,971.8	51,697,901.3	1,187,303.3	-7,469.91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,240,160.2	29,776,546.2	27,545,028.8	1,153,967.3	-7,293.95
Informasi dan Komunikasi	549,155.7	41,878,751.6	36,005,412.4	489,454.9	-20,140.94
Jasa Keuangan dan Asuransi	210,829.0	29,521,633.8	27,497,251.4	194,093.1	2,446.52

Real Estat	453,883.0	13,837,689.5	13,121,319.4	430,874.3	-515.27
Jasa Perusahaan	113,082.4	4,932,613.4	4,561,081.0	104,175.6	420.96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	739,685.9	24,951,869.9	23,676,877.0	721,926.5	-21,116.13
Jasa Pendidikan	914,268.8	32,422,181.3	29,424,905.7	832,715.8	-3,268.98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,120.6	8,880,758.3	7,780,534.3	111,914.1	-3,618.97
Jasa lainnya	261,922.2	24,120,774	22,137,540.0	241,247.3	-937.70

Perhitungan Rata-Rata Differential Shift (Dr) Kabupaten Bandung Barat

Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	Rata-Rata Dr
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60,299.81	-14,115.55	83,241.93	-76,850.37	13,143.96
Pertambangan dan Penggalian	24,982.54	5,843.21	5,258.82	-6,845.38	7,309.80
Industri Pengolahan	136,778.51	-134,529.08	58,710.29	123,149.38	46,027.28
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,654.72	-2,244.60	1,567.24	17,379.38	3,511.83
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-34.41	28.37	-423.80	-49.97	-119.95
Konstruksi	-54,391.28	-3,512.99	41,806.54	27,002.21	2,726.12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-99,404.72	79,378.61	134,401.26	51,887.28	41,565.61
Transportasi dan Pergudangan	-58,120.67	-7,622.63	-41,403.50	-7,469.91	-28,654.18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,766.55	28,628.87	13,341.31	-7,293.95	10,860.70
Informasi dan Komunikasi	-18,945.77	-3,807.56	-33,885.71	-20,140.94	-19,195.00

Jasa Keuangan dan Asuransi	624.31	-1,618.09	3,177.05	2,446.52	1,157.45
Real Estat	-13,103.79	2,150.37	5,793.90	-515.27	-1,418.70
Jasa Perusahaan	-589.23	-718.42	-676.40	420.96	-390.77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,654.94	11,634.15	-11,011.61	-21,116.13	-7,537.13
Jasa Pendidikan	-21,184.23	10,571.07	-32,467.32	-3,268.98	-11,587.37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.56	2,963.80	-7,927.52	-3,618.97	-2,111.03
Jasa lainnya	2,027.51	-74.09	-1,170.80	-937.70	-38.77

Lampiran XI

Hasil Analisis Tipologi Klassen, LQ, dan *Shift-Share* per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi Analisis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tipologi Klassen (Sektor maju dan tumbuh pesat)	√			√					√					√			
LQ (Sektor basis)	√			√				√	√			√	√	√	√		
<i>Shift-Share</i> (Sektor kompetitif)	√	√	√	√		√	√		√								

Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; | 13. Jasa Perusahaan; |
| 2. Pertambangan dan Penggalian; | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; |
| 3. Industri Pengolahan; | 15. Jasa Pendidikan; |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas; | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; | 17. Jasa lainnya. |
| 6. Konstruksi; | |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; | |
| 8. Transportasi dan Pergudangan; | |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; | |
| 10. Informasi dan Komunikasi; | |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; | |
| 12. Real Estat; | |

Lampiran XII

Surat Keterangan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2
Kecamatan Nyamprah Kode Pos 40552

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 582 / Kesbangpol

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

Memperhatikan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Prop. Jabar
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 300/SK.1215-HK/1990, Tanggal 14 Agustus 1990;
4. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor : B-1704/Un.01/F.8/01.6/4/2017, Tanggal 12 April 2017, Perihal Ijin Mencari Data/Wawancara.

MENERANGKAN dan **TIDAK KEBERATAN** untuk Mengadakan Mencari Data/ Wawancara Oleh :

Nama	: JULITA DWI LESTARI
Alamat	: Medang Lestari Blok D.V.17 Rt. 004/010 Ds. Medang Kota Tangerang
Pekerjaan	: Mahasiswi
Tujuan	: Mencari Data/Wawancara
Topik Penelitian	: "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Bandung Barat".
Lokasi	: BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung Barat
Lamanya	: Dimulai 24 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017
Jumlah Peneliti	: 1 (Satu) Orang
Dosen Pembimbing	: ARISMAN, M.Si
Penanggungjawab Umum	: Dr. AMILIN, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., BKP
Penanggungjawab Lapangan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangannya serta maksud Kuliah Praktek Lapangan/ Penelitian/ Riset/ Wawancara dengan menunjukan surat keterangan ini kepada SKPD terkait dan segera ketempat tujuan.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam hukum pemerintahan setempat.
3. Memberikan Salinan laporan dari kuliah Praktek Lapangan/ Penelitian/ Riset/ Wawancara kepada pemda Kabupaten Bandung Barat C.q KANTOR KESATUAN BANGDA DAN POLITIK dalam 2 (dua).
4. Surat Ijin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Bandung Barat, 24 Mei 2017

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KASI PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN



OPA MUSTOPA, SH
NIP. 19690621 199903 1003

Tembusan DIsampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Bandung Barat;
4. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Ybs;
6. Arsip.

Lampiran XIII

Hasil Wawancara Bappeda Kabupaten Bandung Barat

A. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi (Iwan Mustawan Azis, M.Si)

Pertanyaan: **Bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi?**

Jawaban: untuk menjelaskan kebijakan pembangunan ekonomi di masing-masing sektor ekonomi, Bappeda menyusun dokumen standar sekitar 200 halaman yaitu Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi (RIPE) Kabupaten Bandung Barat. Di dokumen tersebut khususnya di bab 4, menjelaskan terkait dengan kebijakan ekonomi mencakup keseluruhan tentang penyusunan pembangunan ekonomi, kemudian adapula permasalahan-permasalahan di masing-masing sektor, dan mempunyai program prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Dengan membaca hasil data sekunder yaitu laporan RIPE, dapat membayangkan cara mengoptimalkan dan meningkatkan potensi ekonomi daerah. Selain itu, dapat mengetahui sektor apa yang berpotensi dan kenapa sektor tersebut dapat berpotensi di Kabupaten Bandung Barat.

B. Kasubid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (Umar Suharyana, Amk, S.Sos)

1. Pertanyaan: **Apakah Sektor Pariwisata menjadi sektor yang berpotensi di wilayah Bandung Barat?**

Jawaban: Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat terletak di wilayah utara yaitu Lembang. Mayoritas objek pariwisata dikelola oleh swasta/perorangan karena akan lebih cepat berkembang. Pariwisata juga dipasarkan keluar negeri dan dalam negeri.

Biasanya wisata yang dimiliki oleh perhutani perkembangannya lama. Karena anggaran atau subsidi yang kecil. Dana yang diberikan dari provinsi kecil jumlah dananya. Pariwisata yang dikuasai oleh perhutani sifatnya jangka panjang yaitu 5 tahun atau sedikit-sedikit dikembangkannya. Contohnya wilayah Selatan Ciluk Balela, pembenahan wisata, promosi, akses jalan, dilaksanakan secara berproses dan tidak sekali jadi karena terkendala anggaran.

Pada objek wisata terdapat tempat penampungan untuk hasil produk pertanian dan peternakan. Di tempat penampungan ini, terdapat hasil produk-produk pertanian dan peternakan yang disimpan sebelum masuk ke tempat wisata.

Sektor swasta pada kasus ini tidak memiliki niatan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Yang diinginkan oleh swasta adalah menyewa beberapa ha lahan yang dimiliki pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan sehingga keuntungan yang didapat seluruhnya akan dimiliki oleh swasta. Jika masa sewa telah habis maka kontraknya dapat diteruskan kembali. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengakhiri kontrak dengan swasta namun hal itu jarang terjadi karena pemerintah

menghargai hasil kerja yang telah dilakukan oleh swasta. Biasanya pihak swasta telah memperbaiki dan membangun motel.

Lembang floating market, Kampung Gajah, The Ranch, Kawasan Ciwangun Indah (KCIC), Maribaya Lodge merupakan objek pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Kebanyakan objek wisata ini dikelola oleh pihak swasta dikarenakan pemerintah tidak mengelola objek ini dengan baik karena dikhawatirkan dituduh korupsi padahal dana nya terbatas.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata yaitu membuka akses investasi dan membuka peluang sewa lahan untuk swasta.

2. **Pertanyaan: Apakah Sektor Pertambangan dan Penggalian dapat dikategorikan sebagai sektor kompetitif? Apabila termasuk sektor kompetitif, mengapa demikian?**

Jawaban: Sektor Pertambangan dan Penggalian hampir didominasi oleh Krakatau Steel, sebuah perusahaan cat terkemuka. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang dihasilkan bagus akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara di sektor penggalian, cukup dominan produk batu kapur karena mudah diolah, mudah dipasarkan, peminatnya banyak, dan gampang diuangkannya. Sementara itu, eksplorasi mengakibatkan terjadinya polusi di wilayah tersebut seperti kabut. Untuk mengatasi hal tersebut, wewenangnya diserahkan kepada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PUPR ini sendiri mengurus di bagian pengairan energi, pertambangan, dan listrik. Sektor ini dikembangkan kebanyakan oleh sektor swasta milik perseorangan. Pemerintah sendiri hanya memiliki aset daerah. Adapun lokasi pertambangan di Padalarang.

3. **Pertanyaan: Apakah sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung Barat?**

Jawaban: untuk saat ini sektor-sektor yang berpotensi dan lebih unggul dibandingkan sektor lain di Kabupaten Bandung Barat antara lain sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sebuah sektor dapat dilakukan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber daya Modal, dan Pemasaran.

4. **Pertanyaan: Bagaimanakah cara pembuatan dan pengambilan keputusan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda?**

Jawaban: Pada awalnya dalam sebuah pembuatan dan pengambilan keputusan sebuah kebijakan Bappeda bekerja sama dengan SKPD. Adapun tahapan awal yang dilakukan adalah ditampungnya perencanaan-perencanaan dari setiap Dinas yang terkait. Kemudian Bappeda akan memberi masukan dan menyeleksi perencanaan tersebut demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya pengambilan keputusan sebuah kebijakan bersifat Ego Sektoral. Namun, direncanakan kedepannya tepatnya pada tahun 2019 berubah menjadi *Grand Desain* untuk mencapai pembangunan sesuai dengan RPJMD. Perubahan sistem dari Ego Sektoral

menjadi Grand Desain dikarenakan akan adanya ahli fungsi pengambilan kebijakan atau keputusan dari SKPD kepada Bappeda. *Grand Desain* akan dimasukkan kedalam RPJMD agar lebih terlihat dan nampak pembangunan yang telah dilakukan.

5. Pertanyaan: **Sektor apakah yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat?**

Jawaban: Sektor pariwisata yaitu Celuk Balela; sektor pertanian di wilayah utara; sektor peternakan yaitu Rumah Potong Hewan dan rumah pasar hewan; serta sektor perikanan yaitu Kolam Jaring Apung.

6. Pertanyaan: **Mengapa sektor Industri Pengolahan tidak termasuk ke dalam sektor basis?**

Jawaban: Industri di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 3 pengelompokan yaitu: Besar dan Menengah yang dimiliki oleh pusat; Kecil yang dimiliki oleh provinsi; dan Mikro (usaha yang asetnya dibawah 200 juta) yang dimiliki oleh kabupaten.

Pendapatan yang masuk ke pusat adalah omset keseluruhan dari usaha besar (tekstil) yang omsetnya di atas 2M. Untuk lebih detailnya skala dan pendapatannya dapat dilihat di BPS untuk mengetahui mana yang termasuk industri kecil menengah maupun besar. Persebaran sektor ini cukup merata hal ini dapat dilihat dari terdapatnya industri sektor ini di setiap daerah.

7. **Pertanyaan: Kebijakan pembangunan ekonomi daerah apa saja yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bandung Barat?**

Kebijakan daerah biasanya arahnya tercantum pada visi dan misi Bupati. Untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan, arah kebijakan atau strategi disusun oleh SKPD dengan mengacu pada visi dan misi Bupati. Kemudian akan di evaluasi arah kebijakannya dan setelah itu melakukan program-program untuk mencapai pembangunan ekonomi yang diinginkan.

C. Kasubid Perencanaan Pertanian, Perikanan, Energi dan Sumber daya Mineral (Ari Wibisana, S.IP)

1. **Pertanyaan: Mengapa sektor pertanian termasuk ke dalam sektor basis?**

Jawaban: Kabupaten Bandung Barat unggul dalam sektor pertaniannya. Hal ini dikarenakan karakteristik alam Bandung Barat adalah wilayah pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pemanfaatan lahan sektor tersebut 50% dari total lahan Kabupaten Bandung Barat. Hampir seluruh daerah pedesaan digunakan pada sektor ini. Adapun perubahan terjadi pada tahun 2016, terjadi penurunan baik lahan maupun sumber daya pertanian karena efek metropolitan Bandung. Dposisi Kabupaten Bandung Barat yang strategis, dekat dengan provinsi yang akan mempengaruhi sektor pertanian. Komoditas yang unggul di sektor pertanian yaitu padi tanaman pangan yang terletak di wilayah Selatan. Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yaitu dengan cara mendistribusikan, mempertahankan

produksi, dan melakukan perlindungan pada sektor pertanian. Bibitnya sendiri tidak ada masalah namun lahannya saja yang menjadi masalah yaitu lahan menjadi menyusut karena ahli fungsi dan juga populasi yang meningkat. Adapun ahli fungsi lahan ini adalah lahan pertanian menjadi lahan industri.

2. Pertanyaan: **Komoditas apa yang menjadi unggulan dalam sektor peternakan?**

Jawaban: Komoditas unggulan di sektor peternakan yaitu susu lebih dominan.

3. Pertanyaan: **Jenis usaha apa yang tergabung dalam sektor perikanan di Kabupaten Bandung Barat?**

Jawaban: Terdapat kolam jaring apung (pasar ikan). Pemerintah ingin mengembangkan usaha ini agar lebih maju lagi. Usaha ini langsung dikelola oleh pemerintah yang akan langsung di jual ke daerah Cilata.

4. Pertanyaan: **Komoditas apa yang menjadi unggulan di sektor perkebunan?**

Jawaban: Komoditas unggulan di sektor perkebunan yaitu kopi dan bunga. Kopi menjadi produsen terbaik di Sindangkerta dan sekitarnya dan menyang predikat juara 2 nasional. Strategi yang dilakukan adalah melakukan interprensi dari sisi pelatihan budidaya, sampai pelatihan dari paska panen sampai pemasaran. Kemudian melakukan kerja sama dengan organisasi, swasta, dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bidang pertanian.

Bunga menjadi komoditas unggulan yang terletak di wilayah Lembang dan sekitarnya. Distribusi terbesar terletak di wilayah Rawa Belong, Jakarta. Dalam melakukan transaksi jual beli, berhubungan langsung dengan petani karena belum terdapat tempat penampungan bunga. Kekurangan pada komoditas ini yaitu tidak mengetahui kapasitas produksi yang di distribusikan ke Rawa Belong dan belum terdapatnya tempat penampungan bunga. Jika ingin membangun pasar bunga, untuk pembebasan lahannya, harganya tinggi. Sementara pembangunan di sektor perkebunan tidak hanya di bidang bunga saja melainkan untuk komoditas yang lain juga. Jika bisa terbangun pasar bunga akan lebih bagus.

D. Kasubid Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman (Wendy Pranandha, ST)

1. **Pertanyaan: Jika dilihat sektor listrik merupakan sektor terkecil di wilayah ini namun dikatakan sebagai sektor basis, mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah ada hubungannya dengan sektor perdagangan?**

Jawaban: Sampai dengan tahun 2016 dari 165 desa ada 84.124 kepala keluarga yg belum dialiri listrik, hampir di 16 kecamatan ada. Tahun 2011, pemberian bantuan pemasangan listrik oleh pemerintah daerah sebanyak 1.112 kepala keluarga, tahun 2012 sebanyak 2.030 kepala keluarga, tahun 2013 sebanyak 2.156 kepala keluarga, tahun 2014

sebanyak 1.722 kepala keluarga, tahun 2015 sebanyak 2.072 kepala keluarga, dan di tahun 2016 sebanyak 2.290 kepala keluarga.

Maka masih banyak kepala keluarga yang belum dialiri listrik yaitu sekitar 72.742 kepala keluarga. Pemerintah daerah masih banyak tanggungan dalam pemasangan listrik di Kabupaten Bandung Barat. Di tahun 2016 alokasi untuk pemasangan listrik sekitar 4,8 milyar. Maka hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam pemasangan aliran listrik salah satunya adalah pendanaan yang terbatas.

Kontribusi terbesar dalam sektor listrik yaitu sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Kontribusi dalam sektor listrik tidak hanya ke sektor perdagangan saja melainkan dari banyak sektor.

2. Pertanyaan: Apakah Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal?

Jawaban: Tidak selalu itu hanya politis. Jika tidak terdapat daerah yang tertinggal maka Kabupaten Bandung Barat tidak akan tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Pasti selalu terdapat daerah tertinggal dan terdapat masyarakat tidak mampu. Maka dengan adanya hal tersebut, banyak program-program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jika semua daerah mampu, tidak akan ada lagi program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pertanyaan: Isu-isinya apa saja yang membuat daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi *booming*?

Jawaban: Pertama, Kabupaten Bandung Barat mempunyai daerah utara yaitu Lembang. Semua orang Jakarta dan daerah manapun, pasti akan memilih tempat wisata/liburan ke Lembang.

Terakhir, mega proyek nasional Bapak Presiden Jokowi yaitu Kereta Cepat Indonesia China. Terdapat 4 wilayah tempat pemberhentian kereta tersebut, yaitu Jakarta, Karawang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Di Kabupaten Bandung Barat rencananya akan mempunyai TOD (Transit Oriented Development) di Cikalongwetan. Apabila dilihat dari *master plan*, Kabupaten Bandung Barat akan mengalahkan Bumi Serpong Damai (BSD).